PEDOMAN KADERISASI KOPRI

(Korps PMII Putri)

PEDOMAN KADERISASI KOPRI

(Korps PMII Putri)

نهضة العلماء
N
U
نهضة العلماء
N
U

DAFTAR ISI

BAB I LANDASAN FILOSOFIS KADERISASI

Tuntutan yang senantiasa dihadapi setiap organisasi adalah tersedianya kader-kader yang meyakini ideologinya, serta bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan organisasi, yang mempunyai tujuan "terbentuknya pribadi muslim yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya." Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOPRI yang merupakan badan semi otonom dari PMII mutlak dijalankan dengan intensif dan terarah, disamping memenuhi tuntutan untuk kehidupan dan pengembangannya.

Kaderisasi yang baik adalah kaderisasi yang tidak melepaskan diri dari realita sosial atau perkembangan zamannya. Dalam konteks kekinian, kaderisasi harus menjadi patokan utama dalam pembentukan watak dan peradaban baru, dimana zaman modern ini manusia dituntut untuk terampil dan bersaing disegala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Hari ini PMII berada di tengah-tengah arus modernisme yang semakin maju dengan pesat maka PMII pun harus mampu bertahan dan lebih maju mengikuti arus modernisme. Maka, pola kaderisasi yang harus dibangun sesuai dengan kondisi sosial sekarang ini. cita-cita mencetak kader yang *ulil albab* menjadi prioritas utama kader-kader PMII, baik laki-laki maupun perempuan.

Kaderisasi yang produktif dan terarah merupakan konsep yang harus menjadi pedoman utama dalam proses pengkaderan. Penguatan kader secara intelektual, skill, dan kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses kaderisasi. Selain itu, tiga pilar dalam kaderisasi yang tidak akan pernah bisa dilepaskan menjadi satu kesatuan yang saling terikat yaitu: keimanan, keterampilan, dan pengetahuan. Kombinasi ini menjadi tanggung jawab organisasi yang harus menyegerakan melakukan pengkaderan sesuai dengan aturan main organisasi, dan menjadi ghiroh gerakan dalam proses pengkaderan.

Setiap masa atau zaman pasti memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda. Maka, diperbolehkan formula-formula baru untuk selalu menyegarkan system pengkaderan yang lebih baik. Keberhasilan seorang kader tergantung bagaimana proses pengkaderan itu berlangsung. Jangan pernah berharap lebih organisasi akan menghasilkan kader-kader sesuai dengan yang

dicita-citakan bersama, jika proses pengkaderan hanya sebatas ceremonial semata. Maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran dari organisasi itu sendiri.

Konsep pengkaderan yang dilakukan oleh PMII saat ini mengacu kepada Multi Level Strategi gerakan. KOPRI yang merupakan bagian dari PMII yang *concern* pada kaderisasi putri yang ada di PMII, oleh karena itu konsep pengkaderan yang ada di PMII harus tertuju kepada seluruh kader tanpa pandang bulu baik berdasarkan jenis kelamin, ras, dan status sosial lainnya. PMII yang merupakan organisasi kader, secara otomatis KOPRI pun termasuk didalamnya, karena KOPRI merupakan bagian dari PMII sehingga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pembentukan karakter kader-kader PMII baik laki-laki maupun perempuan. Pada hakekatnya kaderisasi di PMII sudah semaksimal mungkin dalam proses pembinaan terhadap anggota PMII. Namun, menjadi sebuah fenomena ketika kaderisasi yang dijalankan secara beriringan, tetapi kuantitas dan kualitas kader putri PMII jauh dibawah kader laki-laki PMII. Sehingga KOPRI membutuhkan dukungan moral, politik sekaligus intelektual khususnya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan grand design yang telah dirancang PMII. Maka perlu adanya refleksi bersama untuk peningkatan kualitas kader baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mensinergikan arah gerak kader-kader PMII secara keseluruhan. Harus ada keseriusan dan perhatian lebih dalam memperkuat wacana gender di PMII. Yang diperbaiki adalah konsep sosialisasi gender dalam konsep besar kaderisasi. Apabila konsep gender dipisah dari kerangka besar pengkaderan maka selamanya persoalan gender di internal organisasi tidak akan pernah beranjak karena dua hal tersebut sangat berkaitan erat. Keduanya berbicara soal kader dan harapan organisasi terhadap kader.

Maka berdasarkan hal diatas, kini diusahakan perbaikan sistem pendidikan kaderisasi KOPRI secara menyeluruh yang diharapkan dapat menghasilkan kader putri PMII yang berbobot untuk menghidupkan dan mengelola mekanisme organisasi. Untuk itulah disusun buku Modul Kaderisasi KOPRI.

A. KONDISI PEREMPUAN

Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan dunia internasional, maka suatu negeara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksitas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas (*border*), keamanan nasional (*national security*) atau keamanan manusia (*human security*) perlu adanya satu pemahaman wawasan nusantara didalam menentukan kebijakan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai arus globalisasi dan gelombang reformasi, maka diperlukan suatu rumusan kebijakan/strategi geopolitik Indonesia yang handal.

Kondisi ini juga membawa dampak yang sangat besar bagi perempuan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kondisi perempuan masih sangat diperhitungkan dalam segala aspek, sosial, budaya, dan politik. Permbatasan ruang dan waktu perempuan menjadi asset yang sangat berharga, dimana posisi perempuan masih didomestifikasikan baik dalam ruang publik maupun runag privat. Manusia berjenis kelamin perempuan tidak mampu menentukan hidupnya sendiri, anggapan-anggapan umum tentang perempuan yang lemah, lembut, patuh, penurut, penyabar, penyayang, dan justifikasi lainnya. Yang membuat perempuan terlemahkan secara sistematis ditambah prasangka ini telah mendapat penguatan secara struktur masyarakat terwujud dalam bentuk kebiasaan dan menjadi norma-norma yang berlaku saat ini.

Kondisi perempuan akan kami bahas dalam beerapa situasi mulai global dan nasional. Potret perempuan saat ini juga tidak lepas dari geo eko-pol internasional yang membuat posisi perempuan menjadi terpinggirkan bahkan menjadi komodity.

1. Situasi Global

Globalisasi dan kemajuan tekhnologi informasi telah menjadikan wilayah kedaulatan suatu negara menjadi lebih abstrak, sehingga mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Karena itu, kerawanan penetrasi asing terhadap wilayah yurisdiksi nasional yang melampaui batas kedaulatan negara, hampir dipastikan mengandung resiko

ancaman keamanan yang bersifat transnasional, antara lain seperti kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigrasi gelap, pembajakan dan perompakan di laut, penangkapan ikan illegal, terorisme internasional, penyelundupan senjata maupun perdagangan anak-anak dan perempuan. Dan kondisi ini membuat negara-negara maju lebih mudah mengakses dan masuk ke negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia termasuk negara miskin yang kemudian di eufinisme-kan menjadi negara berkembang. Dengan luas dan letak yang strategis membuat negara-negara maju merauk keuntungan yang sebesar-besarnya dinegeri ini dengan cara meminjam uang ke negara-negara maju dan dengan penamaan modal asing, didukung oleh pilar-pilar badan dunia seperti World Bank, IMF, WTO, dan perusahaan-perusahaan transnasional lainnya.

Dalam konteks ekonomi politik kekinian, perempuan masih menjadi barang laku pemapanan kapitalisme. Hegemoni kapital yang dilancarkan melalui iklan-iklan komersil membuat penindasan secara terselubung terhadap perempuan semakin sukses.

Dalam tatanan geo-politik ruang-ruang regional-nasional kembali direbut oleh kapitalisme. Disadari atau tidak, ruang sebagai bagian dari wilayah kekuasaan turut mempengaruhi ruang gerak bangsa dan negara. Dengan alasan demikian, dapat dipahami jika ada pencaplokan batas wilayah NKRI oleh negara asing sama halnya dengan menginjak-injak nasionalisme. Semakin besar wilayah, semakin besar ruang gerak.

Akan tetapi, fenomena tersebut terbantahkan ketika kepentingan global merangsek masuk melalui jalur media informasi dan komunikasi. Globalisasi yang membiaskan geografis bangsa, semakin membuat kelompok dominan bergerak bebas melancarkan kepentingannya. Semakin banyak gaya hidup yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi, informasi dan kebudayaan disatu pihak telah membuka cakrawala yang tak terbatas dan kreatif bagi setiap individu untuk menentukan pilihan dan seleranya; namun dipihak lain telah menggiring masyarakat kontemporer kita ke arah krisis identitas, krisis kebudayaan bahkan krisis kepercayaan.[1] Dalam hal ini seketat apapun pertahanan keamanan di tapal batas negara tak berarti apa-apa jika kaum pemodal sebagai pengendali kekuatan ekonomi mampu mengendalikan media. Dalam hal inilah pertarungan ruang kosong terjadi antara nasionalisme dengan hegemoni global.

[11] Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat,* Yogyakarta: Jalasutra, 2006, hlm. 311.

2. Situasi Nasional

Indonesia adalah bagian dari dunia internasional yang saat ini tengah berada dalam krisis imperialisme berkepanjangan. Indonesia adalah negara yang luas dengan posisi strategis, kaya akan sumber daya alam, berlimpah sumber daya manusia, iklim tropis dan subur. Indonesia, sejak jaman orde baru telah berada dalam genggaman imperialisme AS dengan rezim boneka pertamanya, the smiling general Soeharto.

Presiden Joko Widodo sebagaimana presiden-presiden sebelumnya terus konsisten menjalankan skema kebijakan neoliberal di dalam negeri dan mendukung pelaksanaan kebijakan neoliberal ini sebagai politik luar negerinya.Sebagai presiden ke tujuh, rakyat Indonesia sudah sangat lelah terus berada dalam situasi ekonomi yang terus menurunkan kualitas hidup dan mengharapkan perubahan pada sosok Joko Widodo.Namun, harapan ini tak kunjung memperlihatkan titik terang.

Ditengah euforia kemenangan Joko Widodo, tim ahlinya tengah sibuk mendiskusikan dan mengkaji mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini merupakan bukti pertama yang menunjukkan sikap dan politik Joko Widodo yang menghamba pada kepentingan dan dominasi neokolonialis AS di Indonesia. Joko Widodo dengan alasan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa harus ada pemangkasan subsidi untuk sektor energi agar dana hasil pemangkasan subsidi tersebut dapat digunakan untuk sektor produktif. Menaikkan harga BBM ini dilakukan oleh Joko Widodo ditengah dia belum melakukan apa pun untuk rakyat Indonesia.

Kemudian ketahui oleh publik bahwa tidak hanya sekedar melakukan pemangkasan subsidi dengan sebutan memberikan "subsidi tetap", namun kebijakan di sektor energi telah di liberalisasi dan sepenuhnya dikontrol oleh pasar. Itulah sebabnya tidak akan ada stabilitas harga BBM di dalam negeri, akan sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kenaikan harga BBM selalu membawa efek domino pada mahalnya harga-harga lainnya, utamanya harga kebutuhan pokok.Kebutuhan pokok rakyat dalam bentuk sandang, pangan dan papan –pakaian, makanan dan perumahan- semakin jauh dari jangkauan.Kemudian Joko Widodo menurunkan kembali harga BBM karena harga minyak dunia yang juga turun, namun penurunan harga BBM ini tidak pernah mampu menurunkan kembali harga-harga lain yang telah naik.

Untuk bidang pendidikan, telah lama liberalisasi dan privatisasi dijalankan.Hasilnya sudah sangat terasa untuk saat ini.Biaya pendidikan utamanya pendidikan tinggi semakin mahal. Komersialisasi lembaga pendidikan yang dimiliki oleh negara pun meraja lela, hingga mampu mengalahkan mahalnya biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.Mahalnya biaya pendidikan, tidak tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan absennya negara untuk memberikan hak pendidikan kepada warga negaranya telah mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan semakin dikebiri.Ditambah pula dengan pandangan bahwa perempuan bertanggung jawab utamanya untuk mengurus rumah tangga, maka perempuan tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan yang mahal tersebut. Menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, akses perempuan terhadap jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, jumlah buta huruf pada usia 15-45 tahun lebih tinggi perempuan 2-3 kali dibandingkan laki-laki. Sementara, dari 10 tingkat tertinggi di setiap jenjang pendidikan, ternyata 60-70% nya adalah perempuan.

Untuk bidang pelayanan kesehatan, negara telah membuat sistem asuransi kesehatan atau lebih dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dimana masyarakat diminta untuk mendaftarkan diri pada program ini dan membayar premi setiap bulan. Rakyat tentu saja mengambil semua kesempatan yang ada, karena paham tidak akan mampu membayar biaya pengobatan secara langsung. Diskursus yang tengah berkembang di pemerintahan saat ini adalah rencana untuk menaikkan iuran/premi asuransi tersebut dengan alasan asuransi ini mengalami kerugian.

Pelayanan kesehatan yang mahal, tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sulit untuk diakses karena mensyaratkan berbagai dokumen, telah meminggirkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah. Penyuluhan-penyuluhan atau pembagian informasi tentang hidup sehat pun sangat minim di dapatkan oleh perempuan.Secara khusus untuk kesehatan organ reproduksi, pemerintah belum memberikan perhatian yang sungguh-sungguh.Hal ini mengakibatkan perempuan terpaksa menahan sakit yang dideritanya tanpa punya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif dan kemudian mendapatkan pengobatan yang baik.Berkembangnya obat-obat kimia tanpa pengawasan yang serius dari pemerintah

serta minimnya perhatian terhadap obat-obatan lokal telah mengakibatkan rakyat bergantung pada obat-obatan kimia produksi perusahaan besar monopoli.

Kenaikan harga BBM dan tren kenaikan harga-harga saat ini (beras, gas, listrik, tiket kereta, dll) memukul perempuan dengan kerasnya.Pengetatan pengeluaran rumah tangga mesti dilakukan, yang artinya adalah turunnya kualitas hidup keluarga. Bagi perempuan yang masih lajang, harus melakukan hal yang sama dan apabila bekerja mungkin harus mengurangi bantuan ekonomi terhadap orang tua. Krisis ekonomi, kehidupan keluarga miskin telah terbukti menjadi salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Telah banyak diberitakan Ibu yang tega membunuh diri dan anak-anaknya karena sudah tidak sanggup hidup dalam kemiskinan, perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak-anak yang menjadi obyek pelampiasan seks, anak-anak jalanan yang hidup keras dan putus sekolah, perdagangan perempuan dan anak, dan lain-lain. Semua itu merupakan bukti bahwa kebijakan neoliberal telah sangat menghancurkan kehidupan rakyat.

Kebijakan neoliberal untuk mendukung kepentingan neokolonialis AS yang dilaksanakan di dalam negeri terbukti telah mengantarkan perempuan dan rakyat Indonesia ke jurang kemerosotan, perempuan berada di dalam jurang kemerosotan terdalam akibat adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam sektornya maupun perempuan sebagai gendernya.

Program pembangunan yang diajukan oleh Joko Widodo tidak berbeda dengan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh presiden sebelumnya, SBY. Joko Widodo menambahkan pada aspek maritim yang seolah merupakan angin segar bagi rakyat dan nelayan Indonesia, namun kebijakan Jokowi di bidang maritim ini tidak jauh dari kebijakan di bidang lainnya, sebatas pembangunan infrastruktur skala besar yang didanai oleh hutang dan merampas tanah rakyat lebih luas lagi, selain merusak hutan untuk menambah kekurangan tanah.

Sementara di perkotaan, buruh selalu memperjuangkan upah layak dan tidak pernah mendapatkannya secara sempurna.Buruh dipaksa bekerja keras dengan upah yang rendah. Pada masa dewasa ini, perempuan pun telah banyak bekerja sebagai buruh dan menghadapi persoalan yang sama, upah yang di dapatkan tidak cukup untuk membiayai keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, hak-hak buruh

perempuan pun jarang sekali di laksanakan, seperti hak cuti haid, melahirkan dan menyusui, tersedianya ruang khusus untuk memerah air susu ibu, toilet yang bersih dari kuman, dan layanan kesehatan di pabrik. Tenaga kerja murah merupakan salah satu hal selain sumber daya alam yang kaya yang "dijual" oleh Joko Widodo untuk mendapatkan investasi.

Pembangunan industri nasional merupakan aspirasi rakyat agar tersedia industri nasional yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mempergunakan model produksi untuk ekspor dan substitusi impor, melainkan produksi oleh rakyat untuk kebutuhan nasional dan mencapai kedaulatan secara ekonomi dan politik. Persoalan mengenai politik upah murah, larangan berorganisasi dan menyatakan pendapat serta jaminan pekerjaan pun akan mampu dijawab apabila Indonesia memiliki industri nasional.

Kaum miskin kota semakin sulit kehidupannya dengan meroketnya harga kebutuhan pokok dan liberalisasi sektor layanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Hampir tidak ada jaminan akan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi mereka, utamanya bagi perempuan dan anak-anak.

Krisis, kemerosotan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia, perempuan Indonesia, merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan neoliberal yang dipaksakan oleh neokolonialis pimpinan AS untuk mempertahankan dominasi dan keberadaannya. Sehingga, perempuan Indonesia harus bangkit dan berjuang melawan imperialisme dan kebijakan neoliberalnya.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN PEREMPUAN DI DUNIA

Keadaan perempuan yang ditindas akhirnya membangunkan dan membangkitkan satu pergerakan yang berusaha menghilangkan penindasan-penindasan itu. Pecahnya revolusi Amerika dan revolusi Perancis pada abad ke-18 yang membuat pertama kali ada pergerakan perempuan. Didalam revolusi itu perempuan-perempuan secara tersusun menuntut hak-haknya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, memprotes kedzaliman atas diri mereka. Sebelum revolusi itu belum muncul pergerakan perempuan, yang ada hanya di kalangan kaum perempuan bangsawan dan hartawan semacam kegiatan pengisi waktu nganggur, hanya kesukaan untuk mengisi waktu luang yang dikerjakan oleh

perempuan-perempuan bangsawan dan hartawan yang jemu dengan terlalu banyaknya waktu luang.

1. Aliran-Aliran Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan tidak pernah mengalami keseragaman di muka bumi ini. Antara satu negara dan satu budaya dengan negara dan budaya lain, memiliki pola yang kadang berbeda, bahkan ambivalen. Feminism sebagai sebuah isme dalam perjuangan gerakan perempuan juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Ide atau gagasan para feminis yang berbeda di tiap negara, ini misalnya tampak pada para feminis Itali yang justru memutuskan diri untuk menjadi oposan dari pendefinisian kata feminism yang berkembang di barat pada umumnya. Mereka tidak terlalu setuju dengan konsep yang mengatakan bahwa dengan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan di ranah public, akan berdampak timbulnya kesetaraan. Para feminis Itali lebih banyak mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Mereka memiliki UDI (Unione Donne Italiane) yang setara sebesar NOW (National Organization for Women) di Amerika Serikat. Pola penekanan perjuangan feminis Itali ini mengingatkan kita pada gaya perjuangan perempuan di banom-banom NU di Indonesia.[2]

a. Gerakan Perempuan di Amerika Serikat

Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Karenanya gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain *Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft.* Bertahun-tahun mereka berjuang, turun jalan dari 200 aktivis perempuan sempat ditahan, ketika itu.[3] Pada awal tahun 1800-an, gerakan progresif baik lelaki maupun perempuan bersama-sama memperjuangkan penghapusan perbudakan. Aktivis-aktivis perempuan juga terlibat dalam gerakan anti perbudakan

---

[2] Nursayyid Santoso Kristeva, M.A, *Manifesto Wacana Kiri*, hlm. 115.
[3] Nursayyid Santoso Kristeva, M.A, *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: INPHISOS, 2010, hlm. 115. Selanjutnya disebut dengan Nursayyid Santoso Kristeva, M.A, *Manifesto Wacana Kiri*.

ini dan turut pula memperjuangkan kebebasan bagi kaum perempuan, selain mengakhiri perbudakan. Puncak dari perjuangan mereka kemudian melahirkan sebuah pertemuan tentang hak-hak perempuan yang pertama di Seneca Falls, New York pada tahun 1848.[4] Pertemuan yang diorganisir oleh aktivis anti perbudakan, Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott tersebut dihadiri oleh belasan kaum perempuan dan juga sejumlah lelaki yang mendukungnya. Dari pertemuan tersebut kemudian dihasilkanlah Declaration of Sentiments 1848 (Deklarasi Keprihatinan), yang isinya mengamanatkan baik hak-hak kaum perempuan maupun rancangan tuntutan-tuntutannya – seperti kesetaraan di depan hukum, pendidikan, upah dan hak untuk memilih dan dipilih.[5]

Organisasi mengambil peranan penting dalam perjuangan perempuan gelombang I. Keberadaan organisasi berskala nasional mampu membantu perluasan penyadaran akan pentingnya pembebasan perempuan. Organisasi-organisasi seperti *The National Womens Suffrage Association* (Perhimpunan kaum perempuan nasional bagi hak pilih/dipilih) dan *The American Womens Suffrage Association* (Perhimpunan kaum perempuan amerika bagi hak pilih/dipilih), mengambil peranan penting sehingga tercapai tuntutan kaum perempuan pada masa itu, yakni hak pilih bagi kaum perempuan. Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan alat organisasi yang terstruktur secara nasional, memudahkan perjuangan perempuan dalam hal kampanye, mobilisasi massa untuk memenangkan tuntutan. Tercapainya hak pilih perempuan tidak terlepas dari peran organisasi yang mampu menyatukan kekuatan perempuan secara nasional dengan mobilisasi-mobilisasi massa yang mewujud dalam bentuk aksi-aksi protes, vergadering (pertemuan massal) seperti pertemuan nasional yang menghasilkan deklarasi keprihatinan, hal ini menunjukkan bahwa pelibatan seluruh kaum perempuan (basis massa) penting dalam perjuangan perempuan. Selain itu, berbagai kelompok diskusi mengenai pendidikan, politik dan budaya kemudian didirikan. Pada tahun 1896, *The National Association of colored Women* (Perhimpunan nasional bagi kaum perempuan kulit berwarna) didirikan untuk menyatukan kelompok-kelompok perempuan kulit hitam yang terpisah-pisah.

[4] Tina Gianoults, *SETARA II,* Monthly Review Foundation, Copy Right 2001. Selanjutnya disebut dengan Tina Gianoults, *SETARA II*.

5 Tina Gianoults, *SETARA*

Organisasi-organisasi kaum perempuan penting lainnya adalah paguyuban-paguyuban yang moderat. Paguyuban-paguyuban tersebut dalam realitanya, merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari penganiayaan dan kemiskinan.[6]

Gerakan perempuan turut memberikan penyadaran terhadap buruh perempuan. Untuk pertama kalinya, kaum buruh perempuan mengorganisasikan diri. Pada bulan maret 1859 di New York, Amerika Serikat, buruh perempuan membentuk serikat buruh pertama untuk memperjuangkan hak dasar mereka di tempat kerja, termasuk 8 jam kerja, cuti hamil, jaminan kesehatan. Perjuangan kaum buruh perempuan ini dilakukan, bersamaan dengan meluasnya gerakan perempuan di Eropa dan Amerika Serikat, yang ditandai dengan berdirinya organisasi perempuan memperjuangkan hak pilih, seperti *International Women Suffrage Alliance*. Para buruh perempuan mulai mengorganisir aksi demonstrasi menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Pada awal abad ini, gelombang aksi protes terus meluas. Tercatat pada tanggal 8 Maret 1908, sebanyak 15.000 perempuan turun ke jalan kota New York menuntut diberlakukannya 8 jam kerja, hak pilih dalam pemilu, serta dihentikannya memperkerjakan anak dibawah umur. Pada tahun 1910, di Kopenhagen, Denmark, diselenggarakanlah Konferensi Sosialis Internasional. Dalam konferensi tersebut, dihasilkan sebuah keputusan bahwa hari perempuan harus diperingati secara internasional. Salah satu tokoh gerakan perempuan dari Jerman, Clara Zetkin, merupakan yang pertama kali melontarkan gagasan itu, guna memperingati mogoknya buruh perempuan pabrik garmen yang terjadi di Amerika Serikat, sekaligus menghormati gerakan hak pilih kaum perempuan. Baru pada tahun berikutnya, beberapa di negara Eropa mulai memperingati hari perempuan internasional pada tanggal 8 Maret, yang sampai kini kita peringati. Lahirnya hari perempuan internasional, merupakan hasil dari perubahan sosial yang menyertainya dan didukung oleh perkembangan gerakan perempuan yang kala itu mengusung hak pilih dalam pemilu bagi perempuan melalui pengorganisasian aksi massa.

Di sisi lain, lambat laun, beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai mengabulkan hak pilih bagi perempuan dalam pemilu lokal. Capaian perjuangan hak

[6] Tina Gianoults, *SETARA II*.

pilih perempuan menunjukan hasilnya. Pada tahun 1917, Jeannette Rankin, dari Montana, menjadi perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat dan pada tahun 1920 perempuan memenangkan hak suaranya.

b. Gerakan Perempuan di Eropa

Kondisi-kondisi yang tak tertahankan yang dialami perempuan mendorong munculnya pemikiran-pemikiran untuk membebaskan kaum perempuan sehingga, pada tahun 1785, di kota Middleburg, sebelah selatan Belanda, untuk pertama kalinya didirikan sebuah perkumpulan masyarakat ilmiah bagi kalangan perempuan, yang dipelopori oleh *Lady Mary Wortly Montagu dan Marquis de Condorcet*.

Revolusi Perancis pada tahun 1789, memberi sumbangan yang besar bagi kemajuan kaum perempuan, mendorong kaum perempuan bergerak untuk mendapatkan hak-haknya. Dibandingkan dengan perempun kelas menengah, kaum perempuan kelas pekerja relatif lebih memiliki kebebasan, karena mereka terlibat dalam proses produksi – sebagai tukang jahit, tukang cuci, penjaga toko, dan lain-lain. Keterlibatan dalam proses produksi membuat mereka memiliki keleluasan untuk keluar rumah, sehingga bisa terlibat penuh dalam aksi-aksi demonstrasi menggulingkan kekuasaan absolut Raja Louis IV.

Revolusi Perancis menggema ke seluruh dunia, mendorong kaum perempuan untuk bangkit dari ketertindasannya. Mulai bermunculan lah pemikir-pemikir feminis dengan gagasan-gagasannya tentang pembebasan perempuan. Adalah seorang feminis Perancis, Olympe de Gouges, pada tahun 1789 mengusulkan satu “Deklarasi Hak-Hak Asasi Perempuan” yang menuntut agar semua hak-hak istimewa laki-laki dihapuskan. Usulan Olympe de Gouges ini memicu munculnya jurnal-jurnal yang menuntut hak-hak perempuan; dan Theoroigne de Mericourt menyatakan, bahwa Revolusi Perancis didominasi oleh laki-laki, dan kaum perempuan masih belum sanggup untuk mengambil kebijakan politik. Pada tahun 1790, keistimewaan anak laki-laki (sulung) dalam hal hak waris dihapuskan, sehingga kaum perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Pada tahun 1792, undang-undang tentang perceraian diatur dan meringankan kaum perempuan. Walau demikian, tidaklah mudah untuk menjalankan undang-undang tersebut, khususnya bagi perempuan kelas

menengah. Namun sayangnya, teror Jacobin (1793) melencengkan arah Revolusi Perancis, bahkan menghancurkan Revolusi serta potensi gerakan perempuan di Perancis. Bahkan de Gouges sendiri harus menjalani hukuman gantung akibat teror tersebut. Pada perjalanannya, kondisi buruh perempuan pasca Revolusi Perancis tidak mengalami perubahan yang cukup berarti, sehingga pada tanggal 2 November 1892, diterbitkan piagam pertama yang mengatur tentang buruh perempuan, yang isinya melarang kerja malam dan pembatasan jam kerja.

Di Inggris, pada tahun 1792 Mary Wolstonecraft, salah seorang pelopor Feminisme Liberal terkenal oleh karena tulisannya yang berjudul *A Vindication of The Right of Women*, yang secara gamblang memaparkan ketertindasan perempuan dan bagaimana perempuan harus berupaya keluar dari ketertindasannya. Dalam tulisannya, ia menyampaikan pentingnya pendidikan yang setara bagi kaum perempuan untuk mendapatkan emansipasi dalam bidang politik dan sipil. Pendidikan sangat penting karena membentuk nalar laki-laki dan perempuan. Dalam tulisannya, Mary mendorong kaum perempuan agar menjadi pembuat keputusan yang otonom. Pada tahun 1830-1840, sejalan dengan pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji mulai diperbaiki dan perempuan diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum pria.

Menyusul pendapat *John Stuart Mill dan Harriet Taylor* dalam tulisannya *Early Essay on Marriage and Divorce*, pada tahun 1832. Pandangan mereka terhadap pembebasan perempuan adalah “jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual, atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan.” Harriet berpandangan, “Jika perempuan ingin menjadi partner yang setara bagi suaminya, bukan menjadi budak, maka ia harus mempunyai penghasilan dari pekerjaan di luar rumah.” Dalam tulisan-tulisannya, John menuntut dengan keras persamaan bagi perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pada tahun *1845, Friederick Engels,* lewat tulisannya *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (Asal-usul keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara), mencoba menjawab persoalan atau akar penindasan kaum perempuan

dengan membuktikan bahwa penindasan perempuan bukanlah takdir biologis, melainkan masalah sosial; masalah tatanan politik; dan struktur dalam masyarakat yang telah merekonstruksikan perempuan. Oleh karenanya, tidak semua fase dalam perkembangan masyarakat menindas perempuaan; ada fase dimana kaum perempuan mengalami masa kejayaannya.

Di Inggris, pada tahun 1856, komite untuk revisi UU Hak Milik Perempuan yang menikah dibentuk. Pada tahun 1858, Englishwomen Journal diterbitkan; 1859 Perhimpunan untuk memajukan kesempatan kerja didirikan, dengan strategi utamanya lewat percetakan dan penerbitan; tahun 1870-1880-an ditandai dengan perjuangan untuk menghapuskan perbedaan antara perempuan bangsawan dengan perempuan penghibur; 1918, hak pilih pertama kali diberikan, setelah melalui perjuangan panjang sejak tahun 1903 oleh 3.000 buruh tekstil.

Pada tahun 1869, Leon Richier menulis *The Rights of Women,* dan pada tahun 1878 mengorganisir kongres internasional untuk membahas masalah-masalah perempuan.

Kongres Sosialis, pada tahun 1879, walau memproklamirkan kesetaraan seks, namun fmeinisme masih dianggap kepentingan kedua, karena masih memandang pembebasan perempuan bergantung pada kebebasan kaum burh. Kemudian, pada tahun 1892, sebuah Kongres Feminis diselenggarakan, tetapi belum juga memberikan kemajuan yang berarti.

Di Jerman, gerakan feminis juga mengalami gejolak terutama karena kaum sosialis Jerman mendukung feminisme. Tokohnya yang terkenal, Clara Zetkin, menjadi salah satu pimpinan partai. Zetkin aktif berjuang agar kaum perempuan mendapatkan hak-hak suaranya dan aktif dalam kehidupan politiknya. Selain Clara tokoh feminis Jerman lainnya adalah Rosa Luxemburg.

Di Soviet Rusia, gerakan feminisme mengalami kemajuan yang pesat, selama perang Rusia-Jerman banyak kaum perempuan yang menggantikan posisi laki-laki dalam banyak bidang pekerjaan produksi (karena laki-laki pergi berperang), sehingga mendorong maju tuntutan-tuntutan akan kesetaraan perempuan. Puncaknya pada tahun 1917 – menjelang revolusi – kaum buruh perempuan melakukan satu

demonstrasi besar dengan tuntutan roti-perdamaian-hentikan perang (menuntut kembalinya para suami).

Kaum buruh perempuan memainkan peranan yang besar dalam revolusi Soviet Rusia. Setelah revolusi, pemerintah Lenin memberikan kesetaraan sepenuhnya kepada kaum perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. Tercantum dalam pasal 122 Konstitusi tahun 1936 yang berbunyi: *di Soviet Rusia, perempuan menikmati hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek ekonomi, kepegawaian, kebudayaan, kehidupan publik dan politik.*

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kronik gelombang gerakan perempuan yang terjadi:[7]

Tahun	Peristiwa
1785	**Belanda.** Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di kota Middelburg, sebelah selatan Belanda, dipelopori oleh Lady Mary Wortly Montagu dan Marquis de Condorcet.
1786	**Inggris.** Revolusi Perancis
1789	• **Perancis.** Revolusi Perancis • **Perancis. Olympe de Gouges**, mengusulkan satu Deklarasi Hak-Hak Asasi Perempuan yang menuntut agar semua hak-hak istimewa laki-laki dihapuskan.
1790	**Perancis.** Hak sulung yang menyangkut keistimewaan anak laki-laki tentang hak waris dihapuskan.
1791	**Perancis.** Olympe menerbitkan Deklarasi Hak-Hak Perempuan, meliputi kesetaraan dalam hukum, pemerintahan dan pendidikan.
1792	• **Amerika Serikat**. Tom Paine menulis *The Rights of Man* yang membela kaum konstitusionalis Amerika dan Perancis. • **Inggris. Mary Wolstonecraft** menulis *A Vindication of the Right of Women* setebal 500 halaman, didalam tulisan itulah pertama kalinya ide-ide pencerahan dikaitkan dengan situasi perempuan.

[7] *Asal-Usul Ketidaksetaraan Gender*, lampiran 1-3.

	• **Perancis.** Undang-undang tentang perceraian diatur dan meringankan kaum perempuan. Walaupun demikian tidaklah mudah menjalankan undang-undang tersebut, khususnya bagi perempuan kelas menengah.
1793	**Perancis.** Teror Jacobin melencengkan arah Revolusi Perancis, bahkan menghancurkan Revolusi serta potensi gerakan perempuan di Perancis.
1807	**Amerika Serikat.** Larangan perdagangan budak secarainternasional.
1810-1850	**Amerika Serikat.** Perempuan-perempuan kulit hitam mempertaruhkan hidupnya dalam "terowongan rel bawah tanah", yang merupakan rute rahasia untuk melarikan diri dari negara-negara bagian perbudakan di Selatan menuju ke Utara. Salah seorang perempuan yang sangat terkenal dalam misi itu, **Harriet Tubman,** melakukan 13 misi penyelamatan terhadap lebih dari 70 orang budak kulit hitam.
1832	**Inggris. John Stuart Mill** dan **Harriet Taylor** menulis *Early Essay on Mariage and Divorce*, memberi gagasan awal tentang kesetaraan seksual.
1836	**Amerika Serikat. Angelina Grimke** menulis: "investigasi terhadap hak-hak kaum budak membuatku sadar akan hak-hak ku sendiri...". sejumlah kaum perempuan yang tergabung dalam gerakan anti perbudakan, kemudian juga memperjuangkan pembebasan perempuan.
1840	**Inggris.** Konvensi Internasional Anti Perbudakan memperdebatkan mengenai boleh tidaknya delegasi perempuan dari AS dilibatkan.
1843	**Perancis.** Flora Tristan, seorang pelopor Feminis Sosialis (Utopia), bergabung dengan serikat buruh terampil (Compagnonages), hingga menginspirasinya mengeluarkan karya **The Worker's Union.**
1845	**Inggris. Frederick Engels** menulis "*The Origin of the Family, Private Property, and the State*", mencoba menjawab persoalan atau akar penindasan kaum perempuan.
1848	• **Perancis.** Komune Paris, Perkumpulan Pembuat Pakaian, guru dan pelayan menerbitkan koran harian pertamanya "Suara Kaum

	Perempuan" (La Voix de Femmes). • **Inggris. Karl Marx** menulis *Communist Manifesto.* • **Amerika Serikat.** Pertemuan di Seneca Falls, New York, pertama kali membahas tentang hak-hak perempuan, pertemuan tersebut melahirkan *Declaration of Sentiments*.
1856	**Inggris.** Komite untuk Revisi UU Hak Milik Perempuan yang Menikah dibentuk.
1858	**Inggris.** Englishwoman Journal diterbitkan.
1859	• **Inggris.** Perhimpunan untuk memajukan kesempatan kerja untuk perempuan didirikan; mendirikan institut untuk perempuan di 19 Langham Place. • **Amerika Serikat.** Pada bulan Maret, buruh perempuan membentuk serikat buruh pertama, untuk memperjuangkan hak dasar di tempat kerja, termasuk 8 jam kerja, cuti hamil, serta jaminan kesehatan di New York Amerika Serikat.
1865	**Inggris.** Perempuan-perempuan Langham Place mengorganisir petisi-petisi untuk Undang-undang Hak Pilih Perempuan, disampaikan kepada parlemen.
1867	**Amerika Serikat.** Amandemen ke-15 terhadap Konstitusi berhasil memberikan hak suara kepada kaum lelaki kulit hitam. The National Women"s Suffrage Association (Perhimpunan Nasional Perempuan untuk Hak Pilih/Dipilih), menentang amandemen ke-15. The Amerika Women"s Suffrage Association mendukung legalisasi hak pilih bagi kaum lelaki kulit hitam dan memasukkan kaum lelaki dalam keanggotaan organisasinya.
1869	**Inggris.** Leon Richier menulis *The Right of Women*, John Stuart Mill menulis *The Subjection of Women*.
1870-1880	**Inggris.** Perjuangan untuk menghapuskan perbedaan antara perempuan bangsawan dengan penghibur.

1878	**Inggris.** Kaum perempuan mengorganisasi kongres internasional untuk membahas masalah-masalah perempuan.
1879	**Kongres Sosialis** memproklamirkan kesetaraan seks, namun feminisme masih dianggap kepentingan kedua, karena masih memandang pembebasan perempuan bergantung pada pembebasan buruh.
1883	• **Amerika Serikat**. Sarah Map Douglass bernama Harriet Purvish, Sarah dan Margaretta Forten, Lucretia Mott, mendirikan Masyarakat Anti Perbudakan Perempuan. • **Jerman.** Auguste Babel dari Partai Sosialis Demokratik Jerman menerbitkan tulisan *Women Under Socialism*. Gerakan Perempuan SDP sejak didirikan sudah beranggotakan 200.000 orang.
1884	**Inggris.** *"The Origin of the Family, Private Property and the State"* diterbitkan.
1890-an	**Australia.** Kaum perempuan mendapat suara di Australia bagian selatan dan barat.
1892	• **Perancis.** Pada tanggal 2 November diterbitkan piagam pertama yang mengatur tentang buruh perempuan, yang isinya melarang kerja malam dan pembatasan jam kerja. • **Kongres Feminis** diselenggarakan, tetapi belum juga memberikan kemajuan yang berarti.
1893	**Selandia Baru.** Sudah mulai memberikan hak penuh bagi perempuan.
1896	**Amerika Serikat**. *The National Association of Colored Women* (Perhimpunan Nasional Kaum Perempuan Kulit Berwarna) didirikan untuk meyatukan kelompok-kelompok perempuan kulit hitam yang terpisah-pisah.
1900-an	**Indonesia.** Kartini, anak seorang Bupati melawan poligini, perkawinan paksa, adat istiadat Jawa, dan penjajahan, serta menyerukan kesetaraan pendidikan bagi perempuan.

1902	**Inggris.** 3000 buruh tekstil perempuan di Yorkshire menandatangani petisi untuk hak pilih.
1903	**Inggris.** Serikat Sosial dan Politik Perempuan (Women"s Social and Political Union – WSPU) didirikan.
1907	**Inggris.** WSPU tumbuh massif. Sekitar 3000 cabang menyebar luas, yang beranggotakan para guru, penjaga toko, pegawai rendahan, pembuat pakaian, dan buruh tekstil. Koran mereka adalah Votes For Woman terjual 40.000 ekslempar perminggu.
1908	• **Amerika Serikat.** Pada tanggal 08 Maret sebanyak 15.000 perempuan turun ke jalan di kota New York menuntut diberlakukannya 8 jam kerja, hak pilih dalam pemilu, serta pekerja anak. Dalam aksi demonstrasi tersebut, mereka mengusung slogan "Roti dan Bunga" Roti melambangkan jaminan ekonomi dan bunga melambangkan kesejahteraan hidup. • **Amerika Serikat.** Pada bulan Mei, Partai Sosialis Amerika menetapkan minggu terakhir di bulan Februari sebagai hari perempuan internasional. • **Australia.** Perempuan di seluruh negara bagian di Australia mendapatkan hak suara.
1909	• **Amerika Serikat**. Amerika Serikat mulai memperingati Hari Perempuan Nasional secara Nasional, untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Februari. • **Australia.** Hak pilih dimenangkan, tapi tidak berlaku bagi perempuan Aborigin hingga tahun 1967. Perhimpunan politik perempuan Australia didirikan untuk megkampanyekan kesetaraan upah dan hak.
1910	• **Denmark.** Konferensi Sosialis Internasional diselenggarakan di Kopenhagen. Dalam konferensi tersebut, dihasilkan sebuah

	keputusan bahwa hari perempuan harus diperingati secara internsional. • **Argentina. Kongres Feminis Internasional** yang pertama.
1911	• **Inggris.** Pemogokan buruh dok pelabuhan dan transportasi. Di Bermondsey, buruh perempuan dari pabrik makanan bergabung dengan 15.000 buruh dari pabrik lain. Mereka menuntut upah yang lebih baik dan hak pilih juga. • **China.** Tan Junying mendirikan Masyarakat Hak Pilih China di Beijing, dan memimpin unjuk rasa perempuan untuk mengawasi rapat-rapat Dewan Konstituante.
1915	**Amerika Serikat.** Kaum perempuan di Amerika Serikat mulai memperingati hari perempuan nasional di hari minggu terakhir bulan Februari.
1915	**Kongres Perempuan Internasional** untuk perdamaian dan anti perang.
1917	• **Amerika Serikat.** Jeannette Rankin dari Montana menjadi perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat dan pada tahun 1920. • **Soviet Rusia**. Gerakan feminisme mengalami kemajuan pesat, selama perang Rusia-Jerman banyak kaum perempuan yang menhentikan posisi laki-laki dalam banyak bidang pekerjaan produksi (karena laki-laki pergi berperang), sehingga mendorong maju tuntutan-tuntutan kesetaraan perempuan. Puncaknya, kaum buruh perempuan melakukan satu demonstrasi besar dengan tuntutan **roti-perdamaian-hentikan perang**. Inilah cikal bakal bagi kemenangan Revolusi Oktober. • **Jepang**. Kampanye terhadap hak pilih perempuan pertama dilangsungkan. Sebelumnya kampanye hak-hak perempuan dan hak pilih dilakukan Kishida Toshiko di abad 19, dilanjutkan oleh kelompok feminis "berkaos kaki biru" Seitocha lewat majalah

	Seito yang berisikan artikel kebudayaan kontemporer, perkawinan, hak perempuan dan hak pilih.
1918	• **Inggris.** Hak pilih pertama kali diberikan. • **Soviet Rusia**. Konsep pelanggaran hukum dihapuskan, aborsi menjadi hak setiap perempuan, dan hukum anti-homoseksual dihapuskan, anak-anak hingga usia 16 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, menjalani wajib belajar gratis. Legislatif mengesahkan cuti hamil bagi buruh perempuan. • **India.** Kongres Nasional India memberikan persetujuan terhadap hak-hak gadis atas pendidikan, atas Aturan Rumah Tangga dan hak pilih. • **Argentina. Partai Feminis Nasional** dibentuk.
1919	• **Argentina.** Organisasi Hak-Hak Perempuan beranggotakan 11.000 orang yang berkampanye demi hak pilih mereka. • **Soviet Rusia.** Program Partai Komunis Rusia pada tahun 1919 menyatakan "*tugas partai untuk saat ini adalah mengutamakan kerja di bidang ide dan pendidikan untuk menghancurkan segala bentuk ketidakadilan di masa lalu, terutama pada strata proletar dan petani yang terbelakang. Partai berjuang untuk membebaskan kaum perempuan dari beban kerja rumah tangga tanpa perlu memberikan persamaan secara hukum, namun dengan rumah-rumah komunal, temapt makan umum, pusat mencuci, perawatan dan lain-lain".* Namun sikap terbelakang terhadap perempuan juga terjadi didalam partai Bolshevik. Tidak terkecuali para pimpinannya.
1921	**Amerika Serikat.** Perjuangan kaum perempuan untuk kontrol kelahiran melahirkan *The American Birth Control League*, yang diorganisir oleh Margaret Sanger.

1922	**Brazil.** Federasi demi kemajuan perempuan Brazil didirikan oleh Bertha Lutz.
1917-1927	**Jerman.** Gerakan feminis juga mengalami gejolak terutama karena kaum sosialis Jerman mendukung feminisme, tokohnya yang terkenal Clara Zetkin menjadi salah satu pimpinan partai. Zetkin aktif berjuang agar kaum perempuan mendapatkan hak-hak suaranya dan aktif dalam kehidupan politiknya. Selain Clara Zetkin tokoh feminis Jerman lainnya adalah Rosa Luxemburg dan Lili Braun.
1950	**Perancis**. Simone de Beauvoir menerbitkan buku "The Second Seks".
1963	**Amerika Serikat.** Betty Friedan menerbitkan buku "The Feminine Mystique" pemerintah mengeluarkan "Equal Pay Right".
1964	**Amerika Serikat.** *Equal Right Act* dan Undang-undang Hak Sipil (Title VII of the Civil Rights Act of 1964) melarang diskriminasi dengan alasan jenis kelamin (diskriminasi seksual), ras, agama atau asal kebangsaan.
1966	**Amerika Serikat.** Betty Friedan, bersama dengan beberapa aktifis perempuan lainya mendirikan organisasi perempuan NOW (National Organization of Women).

2. Gerakan Perempuan di Timur Tengah

Gerakan feminis muslim di dunia Islam, terutama di Timur Tengah atau di dunia Arabia selalu terkait dengan kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan pertentangan antara intelektual ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang melibatkan rezim/pemerintah yang berafiliasi dengan imperium. Fenomena Barat ke Pusat Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa, yaitu Inggris dan Perancis, yang keduanya sedang bersaing sebagai imperium. Inggris terlebih dahulu menguasai India. Adapun Perancis, untuk masuk ke India, terlebih dahulu harus menguasai Mesir (tahun 1798 M) sebagai pintu gerbang masuk ke India. Motif lain Perancis menaklukkan Mesir, adalah politik ekonomi terkait dengan pemasaran dan penyediaan bahan-bahan baku dan menjadikan pusat kegiatan pendistribusian hasil industrinya ke Wilayah Timur Tengah,

serta keinginan yang kuat ekspedisi Napoleon Bonaparte untuk mengikuti jejak Alexander *the Great* dari Macedonia yang pernah menguasai Eropa, Asia sampai dengan India.[8]

Status perempuan di dunia Islam dijadikan subjek studi dan mengundang perdebatan, serta memprofokasi polemik dan prasangka yang hampir tidak dihubungkan dengan kompleksitas realitas. Hal ini setidaknya dapat diketahui atau didiskusikan sebagai diskursus dan memunculkan pergerakan yang disebut dengan feminisme Islam. Pergerakan ini muncul di Amerika, Pakistan, India, Nigeria, Spanyol, Malaysia dan Perancis. Cakupan kerja mereka berkaitan dengan peruabhan sosial secara spesifik berhubungan dengan perjuangan melawan sistem patriakhi dan ketidaksetaraan gender, yang dijadikan sebagai kerangka kerja oleh feminis muslim, tetapi satu bagian menjadi pergerakan global berkaitan dengan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, ada konsesus bahwa pendidikan menjadi kunci utama sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan kajian tentang hak-hak perempuan merujuk pada sumber utamanya, yaitu teks suci al-Qur`an.[9]

Kajian pergerakan perempuan di Mesir dimulai tahun 1919 ditandai dengan munculnya aktifitas feminis yang tergabung dengan ***The Egyptian Feminist Union*** (EFU) dipimpin oleh Huda Sha‟‟rawi. Fokus perjuangnnya adalah hak-hak politik perempuan, perubahan hukum status perseorangan yang mencakup pengendalian perceraian, poligami, persamaan akses pendidikan baik di tingkat lanjutan maupun perguruan tinggi, dan berbagai pengembangan tentang kesempatan profesional bagi perempuan.[10]

Awal perjuangan pergerakan perempuan perempuan dalam pengembangan intelektual dan prinsip-prinsip ideologinya hampir diilhami oleh reformer modernis laki-laki seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, dan yang paling luar biasa adalah Qosim Amin yang pada saat tahun 1919 berkaitan dengan perlawanan Inggris dan masa keberlangsungan dan perluasan berbagai aktivitas perempuan. Disamping itu beebrapa kontribusi perempuan dalam publikasi jurnal sebagaimana mainstream pers yang

---

[8] Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 28.
[9] Morgot Badaran, *Feminisme in Islam: Seculer and Religious Convergenees*, England: Oneworld Publication, 2004, hlm. 4.
[10] Najde S. Al-Ali, *The Women Movement in Egypt, hlm. 5.*

memunculkan debat tentang isu-isu sosial seperti pendidikan, peran perempuan dalam kelaurga, dan hak-hak perempuan.[11]

Sementara itu periode 1945-1959 muncul organisasi perempuan, yaitu Bint el-Nile (Daughter of the Nile) yang dipimpin oleh Doria Shafik. Pergerakan ini sebagai suatu yang baru dan menyegarkan gerakan feminis, bertujuan untuk memproklamirkan hak-hak politik secara penuh bagi perempuan. Kegiatan ini juga mempromosikan berbagai programnya, berkampanye perbaikan budaya, perbaikan kesehatan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, mempertinggi pelayanan ibu, dan perawatan anak (childcare). Proses reformasi sosial ini oleh para feminis seperti Inji Aflatoun, Soraya Adham, dan Latifa Zayyad diadopsinya ideologi sosial dengan memperlihatkan pada perjuangan pembebasan perempuan dan hukum (*social equality and justice*). Namun demikian, pergerakan perempuan mulai menyusut terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Naser (1952-1970) ditandai dengan pengendalian ruang gerak organisasi perempuan. Pergerakan perempuan masa Gamal Abdul Naser diindikasikan hampir semua pergerakan bergantung atau tidak independen sehingga pasang surutnya pemerintahan berimplikasi terhadap gerakan perjuangan perempuan.[12] Perkembangan wacana keagamaan dalam kalangan feminis muslim yang menonjol adalah pembangunan keluarga dalam perdebatan untuk membentuk kembali fundamental status muslim pribadi atau hukum keluarga secara egaliter. Dalam kerangka kerja tersebut, berbagai isu penting yang menuntut ijtihad atau melakukan reinterpretasi al-Qur`an dan al-Hadits yang dianggap bias gender.

Isu Islam dan perempuan berkembang pesat juga karena dipengaruhi beberapa sarjana muslim seperti *Fatimah Mernissi*, *Rifaat Hasan*, *Nawal el Sadawi*, *Asghar Ali Engineer* dan *Amina Wadud Muhsin*. Respon terhadap wacana perempuan dalam Islam juga tidak seragam mulai dari pemikiran yang bercorak konservatif, moderat hingga liberal.

3. Gerakan Perempuan di Indonesia

Perempuan, sebagai individu maupun secara kolektif, dari jenis kelaminnya, adalah bagian tak terpisahkan dari kolektif sosial: masyarakat. Tak terpisahkan, karena, tanpa

---

[11] Najde S. Al-Ali, *The Women Movement in Egypt, hlm. 5.*

[12] Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Penerj: Imam Khoiri, Yogyakarta: LKIS, 2001, hlm. 174.

perempuan maka tidak ada peradaban manusia. Seperti halnya yang disampaikan Pramoedya Ananta Toer, "*perempuan adalah lautan kehidupan, maka hormatilah ia*". Apa yang disampaikan oleh Pramoedya merupakan himbauan untuk menghargai perempuan, diatas kenyataan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi setara, sebagai manusia, dengan manusia lainnya. Pernyataan Pramoedya ini sekaligus memberikan landasan fundamental atas kontribusi perempuan bagi peradaban manusia.

Soekarno dalam bukunya Sarinah mengatakan: "*bahwa soal wanita adalah soal masyarakat. Sayang sekali masalah wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pergerakan kita. Kita tidak dapat menyusun negara dan menyusun masyarakat jika kita tidak mengerti soal wanita."* Demikian penting soal wanita ini menjadi bahan bagi penyusunan masyarakat dan negara, sehingga pemahaman atas persoalan perempuan menjadi salah satu pijakan dalam membangun gerakan perempuan.

Bentuk kesadaran pergerakan perempuan di Indonesia pada awal abad ke 20 hanya dapat dirasakan oleh perempuan lapisan atas, kemudian dalam perkembangannya makin meluas hingga lapisan bawah. Adanya perubahan seperti ini tidak hanya mendatangkan perbaikan dalam gerakan perempuan, tetapi juga menambah kesanggupannya dan kecakapannya dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan pun tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai lapisan dari organisasi lainnya, seperti: Aisyiyah bagian dari Muhammadiyah, Serikat Perempuan Islam Indonesia bagian dari Partai Serikat Islam Indonesia dan Muslimat NU bagian dari NU.[13]

Untuk mengetahui lebih lanjut gerakan perempuan di Indonesia kami bagi menjadi beberapa fase, antara lain: Gerakan Perempuan Pra Kemerdekaan dan Orde Lama, Gerakan Perempuan Orde Baru, dan Gerakan Perempuan Reformasi sampai Sekarang.

a. Gerakan Perempuan Pra Kemerdekaan dan Orde Lama

Ketika masa prakemerdekaan, gerakan perempuan di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata berasal dari kalangan atas, seperti: Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dan lain-lain. Mereka berjuang

---

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasinal*, Yogyakarta: DEPDIKBUD, 1977, hlm. 70.

mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan dimasa itu.[14]

Dengan kebijakan politik etis pada awal abad ke-20, penguasa kolonial yang menganggap kaum bumiputera malas, bodoh dan tidak beradab membuka ruang-ruang pendidikan secara luas dengan harapan rakyat Hindia Belanda akan menerima peradaban barat dan menjadi bagian kerajaan Belanda dengan sukarela. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh kaum bumiputera yang menganggap kemajuan sebagai tumbuhnya gairah untuk berfikir merdeka, meninggalkan kepatuhan kepada penguasa kolonial dan terlibat kerja-kerja melawan pembodohan, diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan.

Gagasan kemajuan kaum bumiputera terpelajar yang masih bisa dikatakan sedikit, berpengaruh terhadap pandangan mereka tentang perempuan. Mereka tetap melihat peran utama perempuan adalah melahirkan dan merawat anak, tetapi kepedulian mereka akan perlunya satu generasi baru dengan kualitas moral dan intelektual yang lebih baik membuat mereka berfikir tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan sebagai ibu. Sementara kaum perempuan terdidik melihat bahwa sistem kolonialisme dan tradisi feodal sudah menyebabkan kehidupan perempuan secara umum terpuruk.

Di penghujung abad ke-19, ketika Kartini menulis tentang ketertindasannya sebagai perempuan jawa. Ia menyadari bahwa pembebasan perempuan bisa terwujud bila terjadi perubahan pola pikir di kalangan masyarakat secara keseluruhan. Memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan adalah kerja pemberadaban suatu bangsa dan bukan semata-mata tugas perempuan.

Emansipasi perempuan Indonesia merupakan gerak social yang jadi penunjang dan sekaligus bagian yang ikut menentukan dalam periode kebangkitan nasional pada sekitar awal abad 20. Ia bukan terbatas pada usaha mendapatkan hak-hak sederajat dengan pria sebagaimana terjadi di Eropa pada kurun yang hampir bersamaan. Ia

[14] Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang, hlm. 4.

lebih banyak merupakan gerakan untuk mendapatkan faal social lebih banyak daripada yang selama itu dimungkinkan oleh system keluarga yang berlaku.[15]

Semangat inilah yang mendorong perempuan-perempuan terdidik di beberapa tempat menyelenggarakan sekolah-sekolah bagi perempuan. Pada tanggal 16 Januari 1904 sekolah perempuan pertama Sekolah Istri didirikan oleh Dewi Sartika. Delapan tahun kemudian berubah nama menjadi Sekolah Kautamaan Istri dan meluas menjadi 9 sekolah yang memberi perhatian terbesar pada anak-anak perempuan dari kalangan biasa. Di Kotogadang, Roehana Koeddoes mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia pada tahun 1911; dan di Manado Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Keturunannya) pada 1917. Sementara itu ide Kartini dilanjutkan oleh C. Th. Van Deventer beserta istrinya dengan mendirikan Sekolah Kartini pada 1913 di Semarang. R.A Kartini adalah tokoh emansipasi perempuan Indonesia pertama. Khususnya karena pada sekitar pergantian abad, barang 15 tahun sebelum terbit suntingan Abendanon *Door Duisternis tot Licht*, telah berkali-kali mengumumkan tulisan dalam beberapa berkala Belanda. Dengan faal social baru itu teoritis ia telah meninggalkan kedudukannya dalam system keluarga ningrat, golongan atas pribumi pada masanya.[16]

Perlu ditekankan sebutan system keluarga ningrat, karena dalam system ini perempuan tidak ikut berproduksi untuk kehidupan social, maka juga sangat sedikit hak-hak pribadinya. Jadi system ini berbeda dari system keluarga golongan bawahan jawa yang menganut parentalisme, dimana pria dan perempuan sama-sama berproduksi di sawah, ladang, pasar, dalam lingkungan rumah; hak antara pria dan perempuan sama, maka juga tidak ada poligami, sejauh mereka tidak keluar dari sistemnya.[17]

Di kalangan organisasi Islam seperti Muhammadiyah, pada tahun 1917 di Yogyakarta membentuk Aisyiyah yang menyelenggarakan sekolah berkurikulum modern bagi anak-anak perempuan dengan tekanan pendidikan agama. Sedangkan di

---

[15] Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985, hlm. 77. Selanjutnya disebut dengan Pramoedya, *Sang Pemula*.

[16] Pramoedya, *Sang Pemula*, hlm. 77.

[17] Pramoedya, *Sang Pemula*, hlm. 77.

Padang Panjang, Rahma El-Joenoesia, pada tahun 1922, mendirikan pesantren perempuan yang diberi nama Dinijah Poetri.

Dukungan dari para lelaki yang aktif dalam pergerakan nasional menjadi penting, terutama menghadapi tantangan dari kalangan konservatif di kalangan bumiputera yang tidak melihat perlunya perempuan berkumpul, bertukar pikiran, menyatakan pendapat dan bekerja untuk masyarakat. Disamping itu juga perempuan membutuhkan bantuan dari laki-laki untuk mengenali dan memanfaatkan perangkat kerja modern, seperti organisasi, penerbitan dan pertemuan umum. Poetri Mardika didirikan di Jakarta pada tahun 1912, di dorong oleh Boedi Oetomo. Sementara surat kabar perempuan pertama, Poetri Hindia, yang diterbitkan oleh junalis R.M. Tirtho Adhi Soeryo di Bandung pada tahun 1909, masih dipimpin dan diawaki oleh laki-laki. Baru tiga tahun kemudian, Roehanna Koeddoes menerbitkan Soenting Melajoe (Bukittinggi) yang sepenuhnya dikelola oleh perempuan. Dalam waktu kurang lebih 15 tahun organisasi-organisasi lainpun berdiri di berbagai kota dengan kegiatan, antara lain: menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial bagi perempuan, memberi beasiswa kepada anak-anak perempuan berbakat, menyebarkan informasi tentang pendidikan, dan menerbitkan surat kabar mingguan untuk menyebarluaskan gagasan tentang kemajuan dan keadaban perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia I di Jakarta 1928 dan II di Yogyakarta 1935 berulangkali menekankan pandangan tentang pentingnya keutuhan rumah tangga dengan perkawinan yang bahagia. Persoalan sosial seperti perdagangan perempuan, prostitusi, pergundikan, atau kawin paksa diperbincangkan dalam kerangka pentingnya membangun institusi perkawinan dan kerumahtanggaan yang sehat dan kuat demi kemajuan dan keadaban bangsa. Selanjutnya masalah poligami ini menjadi sumber perdebatan sepanjang sejarah gerakan perempuan, apakah poligami sesungguhnya sumber masalah atau bagian dari penyelesaian masalah bagi perempuan? Hal ini mendorong Kongres Perempuan Indonesia II membentuk Komisi Penyelidik Hukum Perkawinan dibawah pimpinan ahli hukum Maria Ulfah Santoso yang hasilnya disampaikan pada Kongres Perempuan III. Kesimpulannya adalah bahwa pada akhirnya masyarakat Indonesia akan sepakat bahwa poligami harus dihapuskan. Dari perdebatan tentang poligami dapat dipelajari bahwa soal

pelembagaan perkawinan dan posisi perempuan didalamnya menjadi masalah politik kebangsaan. Organisasi-organisasi perempuan bukannya tidak menyadari sisi politis dari perjuangan mereka. Namun, kepelikan yang mereka alami saat berhadapan dengan adat dan agama membuat mereka memilih jalur-jalur aman dalam memperjuangkan kebutuhan dan hak-hak perempuan. Tuduhan dari kalangan Islam bahwa kaum nasionalis sudah berniat meghinakan Islam dan mencerai beraikan Rakyat Indonesia dengan membicarakan poligami membuat kongres-kongres perempuan dimasa sebelum kemerdekaan tidak berbicara tentang agama dan politik.[18] Pada Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1938, yang kemudian ditetapkan sebagai hari ibu, muncullah semboyan "Merdeka Melaksanakan Dharma", yakni menekankan pentingnya tugas perempuan sebagai ibu keluarga, ibu masyarakat dan ibu bangsa.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, semua organisasi perempuan dilarang kecuali Fujinkai yang merupakan organisasi bentukan Jepang untuk para istri pegawai pemerintah dan sebagai wadah memobilisir dukungan demi kepentingan fasisme Jepang. Salah satu kegiatan dari Fujinkai ini adalah pemberantasan buta huruf.

Soekarno pun turut ambil andil dalam pergerakan perempuan masa itu dengan menganggap soal perempuan adalah soal yang amat penting, soal perempuan adalah soal masyarakat. Pasca proklamir kemerdekaan Soekarno mengadakan kursus-kursus terhadap para perempuan republic dan kemudian dia tuliskan dengan judul buku Sarinah.

Menurut Soekarno melihat keadaan perempuan saat itu mengatakan dalam bukunya bahwa kita bangsa Indonesia, kita terbelakang didalam banyak urusan kemajuan. Kita didalam urusan posisi perempuan pun terbelakang, tetapi keterbelakangan ini bermanfaat, kita dapat melihat dari keadaan kaum perempuan di negeri-negeri yang lain, bagaimana soal perempuan harus kita pecahkan.[19]

Pada masa orde lama ini, akses perempuan untuk berorganisasi sangat kuat, karena ada keinginan dari Soekarno agar perempuan berbareng bergerak

---

[18] Materi-materi Konferensi Nasional Perempuan Indonesia, 2014, hlm. 9.

[19] Soekarno, *Sarinah*, Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963, hlm. 10. Selanjutnya disebut dengan Soekarno, *Sarinah*.

mempertahankan kemerdekaan, dan perempuan pada saat itu ikut membantu mempertahankan kemerdekaan dan turut membebaskan Irian Barat.

Untuk mempermudah mempelajari sejarah gerakan perempuan yang bermunculan di Indonesia, dapat dilihat pada kolom dibawah ini:

No	Periodisasi	Aktor Gerakan	Karakter Gerakan (Isu Utama)	Gagasan
1.	1912-1928	Putri Medika	Kesetaraan gender	Akses pendidikan, keadilan peran dalam rumah tangga
2.	1920	Gerakan Perempuan Mayoritas	Peran aktif dalam wilayah politik	Partisipasi perempuan dalam kancah politik, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan
3.	1928-1935	Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI)	Sosialis-Nasionalis	Perlindungan wanita dan anak-anak dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, menuntut pendidikan bagi anak-anak. Dan kedudukan wanita dalam perkawinan
4.	Pasca Kemerdekaan (1945-1946)	WANI (Wanita Indonesia) dan KOWANI (Kumpulan dari Beberapa organisasi perempuan)	Perbaikan nasib perempuan	Menuntut dan mempertahankan keadilan social
5.	1950-1965	GERWIS	Peningkatan pendidikan kaum perempuan	Orientasi pendidikan yang lebih terhadap perempuan dan menyediakan fasilitas penitipan anak

6.	1954	GERWANI	Politik praktis	Partisipasi perempuan di dalam parlemen, menuntut suara perempuan di parlemen, pembentukan organisasi perempuan, dan menuntut hukum perkawinan

GERWANI dalam prosesnya mampu menunjukkan eksistensinya dengan sebuah keberhasilan mampu memobilitasi massa (organisasi-organisasi perempuan) sekaligus sebagai satu-satunya organisasi perempuan terbesar waktu itu dengan jumlah anggotanya lebih satu juta massa. GERWANI mampu menjadi pelopor gerakan perempuan dibidang politik. Sampai kemudian tibalah masa demokrasi terpimpin (pergantian pucuk kekuasaan orde lama ke orde baru) yang berimplikasi pada penghancuran gerakan perempuan, termasuk GERWANI pada tahun 1965 yang ditandai dengan runtuhnya orde lama.[20]

b. Gerakan Perempuan Orde Baru

Di masa kemerdekaan dan masa orde lama, gerakan perempuan terbilang cukup dinamis dan memiliki bargaining cukup tinggi. Dan kondisi semacam ini mulai tumbang sejak orde baru berkuasa, bahkan mungkin perlu dipertanyakan: adakah gerakan perempuan dimasa rejim orde baru? Bila menggunakan definisi tradisional dimana gerakan perempuan diharuskan berbasis massa, maka sulit dikatakan ada gerakan perempuan ketika itu.[21] Disini ada semacam domestikasi gerakan; dimana orientasi gerakan diarahkan pada wilayah-wilayah domestic.

Penumpasan yang dilakukan oleh Suharto terhadap kelompok kiri dan revolusioner yang kemudian seringkali disebut sebagai tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia, merupakan awal dari sejarah kelam gerakan perempuan. Sejarahpun mengalami distorsi, dimana kaum perempuan yang tergabung dalam

[20] Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang, hlm. 7.
[21] Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang, hlm. 7.

gerakan perempuan khususnya gerwani dianggap sebagai sosok-sosok perempuan tanpa rasa peri kemanusiaan dan menumpas habis gerakan ini. inilah titik balik gerakan perempuan, dimana pasca itu gerakan perempuan direduksi dan hanya menjadi alat pelanggeng keuasaan Suharto. Lewat wadah PKK dan Dharma wanita, wadah-wadah perempuan ini menjadi alat mobilisasi kaum perempuan dalam program pembangunanisme. Dengan kepandaian memutarbalikkan bahasa, orde baru menyebut penghilangan peran perempuan dalam dunia politik ini sebagai "normalisasi" posisi perempuan. Jadi, situasi keterlibatan perempuan dalam politik dianggap abnormal, sementara domestifikasi peran dinilai sebagai hal normal belaka.

Gerakan perempuan di masa rejim otoriter orde baru muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor politik makro dan mikro. Factor-faktor politik makro berhubungan dengan politik gender dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 80-an. Sedangkan factor politik mikro berkaitan dengan wacana tentang perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan orde baru. Wacana-wacana ini termasuk pendekatan *Women in Development* (WID) yang telah mendominasi politik gender orde baru sejak tahun 70-an, juga wacana feminism yang dikenal oleh kalangan terbatas (kampus/akademis) dan ornop.[22]

Walaupun telah berdiri organisasi-organisasi seperti IDHATA (Ikatan Dharma Wanita), akan tetapi fungsi daripada organ tersebut hanya sebagai wadah perkumpulan para perempuan-perempuan atau istri kepala desa, lurah, polisi serta pejabat. Wilayah garapannya pun hanya pada masalah keperempuanan yang sifatnya domestic. Tidak pernah sekalipun menyoroti masalah social kemasyarakatan ataupun politik.[23]

Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pemerintahan orde baru di identikkan dengan peraturan yang otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak diikutsertakannya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan keputusan. Andres Uhlin berpendapat bahwa selain dominasi Negara atas masyarakat sipil, struktur ekonomi dan politik global, struktur kelas, pembelahan atas dasar etnis

[22] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 11.
[23] Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang, hlm. 6.

dan agama, maka hubungan gender juga mendukung kelanggengan kekuasaan rejim orde baru.[24]

Untuk memahami politik gender ini sangat penting, menganalisis bagaimana rejim orde baru ini berhubungan dengan hubungan-hubungan gender sejak ia berkuasa setelah peristiwa 1965. Rejim orde baru dibangun diatas kemampuannya untuk memulihkan keteraturan. Pembunuhan besar-besaran berskala luas yang muncul digunakan untuk memperkuat kesan di masyarakat Indonesia bahwa orde lama adalah kacau balau dan tak beraturan. Rejim orde baru secara terus-menerus dan sistematis mempropagandakan komunis adalah amoral dan anti agama serta penyebab kekacauan.[25]

Orde baru menginstruksikan sebuah ideology gender yang mendasarkan diri pada ibuisme, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai tak layak. Politik gender ini termanifestasikan dalam dokumen-dokumen Negara, seperti GBHN, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.[26]

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah orde baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisas-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, PKK) membantu pemerintah menyebarluaskan ideology gender ala orde baru. Gender politik ini telah diwarnai pendekatan WID sejak tahun 70-an. Ini dapat dilihat pada Repelita kedua yang menekankan pada "partisipasi populer" dalam pembangunan, dan mengkonsentrasikan pada membawa perempuan supaya lebih terlibat pada proses pembangunan.

Dibawah rejim otoriter, implikasi politik gender ini ternyata sangat jauh, tidak sekedar mendomestifikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi perempuan, tetapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrument-instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini Nampak pada program KB yang dipaksakan untuk "hanya" perempuan dengan ongkos yang tinggi, yang khususnya dirasakan oleh perempuan kalangan bawah di pedesaan. Ringkasnya politik gender orde baru telah berhasil

[24] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 11.
[25] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 11.
[26] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 12.

membawa perempuan Indonesia sebagai kelompok yang homogeny apolitis dan mendukung peraturan otoritarian.[27]

c. Gerakan Perempuan Reformasi sampai Sekarang

Disaat teridentifikasi bahwa banyak perempuan yang mengalami pemerkosaan pada peristiwa Mei 1998, sejumlah perempuan mendatangi presiden baru BJ Habibie unutk menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kekerasan pada perempuan yang berlangsung pada Mei 1998 tersebut. Dari kunjungan terhadap presiden tersebut, berdirilah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan mandat utama dari presiden adalah menciptakan situasi yang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melakukan pemantauan atasnya dan memberi masukan kepada para pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak diskriminatif yang berdampak kekerasan terhadap perempuan.

Pada masa reformasi (1998) sentralnya pada masa kepemimpinan Gus Dur sampai sekarang, banyak munculnya LSM-LSM dan PSW (Pusat Studi Wanita). PSG (Pusat Studi Gender) yang diberi hak penuh untuk berkreasi dan mengeluarkan pendapat, terutama bagi organisasi perempuan yang selama ini hak berbicara dan hak berpolitiknya dipasung. Orientasi LSM perempuan dan PSW/PSG lebih mengarah pada program pendampingan masyarakat. Perlu diingat bahwa pergerakan (perempuan) tidak hanya berkutat pada orientasi keperempuanan, adapun persoalan yang lebih makro lagi untuk diperjuangkan dan disikapi adalah keadaan kongrit bangsa Indonesia yang didominasi oleh kaum imperialis yang menguasai sumber-sumber daya alam dan memonopolinya, sehingga menjadikan warga Indonesia hanya sebagai tenaga kerja.[28]

Bila system pemerintahan yang semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka di era reformasi seperti ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia dilihat dari kuantitas peran di sejumlah

[27] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 12.
[28] Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang, hlm. 7.

jabatan strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, justru ada penurunan di banding masa-masa akhir rejim orde baru. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi cabinet. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki.

Di era reformasi ini mereka melakukan konsolidasi gerakan dan menggolkan perbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di tahun 2004, mendesakkan kebijkaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang hendak mewujudkan bahwa semua departemen pemerintah, termasuk birokrasi di daerah harus memberlakukan pengarusutamaan gender dengan penekanannya pada program penguatan institusi. Ide-ide gerakan perempuan pun tidak hanya mewarnai beragam aturan dan kebijakan, tetapi juga mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi gerakan perempuan dalam kelompok civil society. Organisasi-organisasi tersebut misalnya Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Migrant Care*, KAPAL Perempuan, SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia). Organisasi perempuan juga tumbuh subur di lingkungan Islam, antara lain: *Rahima*, *Fahmina*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS). Organisasi-organisasi gerakan perempuanpun tumbuh subur dan berkembang di perbagai daerah di Indonesia, seperti: SAPA Institut dan Institut Perempuan di Bandung, *Legal Research Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) di Semarang, Nurani Perempuan di Padang, Sumatera Barat, *Duek Pakar Inong Aceh* (DPIA) dan *Inong Bale* di Aceh, Suara *Parangpuan* di Manado, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) di Bone, Sulawesi Utara, dan Lembaga Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), dll.

Hanya saja harus tetap diakui angka-angka peranan perempuan di sector strategis tersebut tidak secara otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih berkuasa dalam struktur Negara dan budaya (termasuk dalam rumah

tangga), maka kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensupport perempuan menjadi semacam komoditas.[29]

4. Gerakan Perempuan di NU

Pada awal kemunculannya, NU dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama (Statoeten Nahdlatoel Oelama tahun 1926) juga menetapkan tujuan dan pokok-pokok usaha yang hendak dilaksanakan. Pasal 2 Statoeten Nahdlatoel Oelama tahun 1926 menetapkan tujuan Nahdlatul Ulama adalah:[30]

1. Memegang teguh salah satu madzhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi"i dan Hambali.
2. Mengusahakan apa yang menjadi kemashlahatan agama Islam.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan pokok-pokok usaha yang hendak dilakukan yang meliputi:

1. Mengadakan perkenalan di antara ulama-ulama yang bermadzhab dan memperkuat hubungan di antara mereka.
2. Meneliti kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar agar supaya diketahui apakah kitab-kitab tersebut dari golonganktab-kitab ahlusunnah wal jama"ah ataukah dari kitab-kitab ahli bid"ah.
3. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada madzhab dan disegenap penjuru dengan cara apa saja asalakan baik.
4. Memperbanyak sekolah-sekolah Islam dan sejenisnya juga mengaturnya dengan organisasi yang baik.
5. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kemashlahatan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok dan bantuan untuk meringankan orang-orang yang terlantar dan lemah, juga anak-anak yatim dan orang miskin.
6. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan urusan perekonomian.

Rumusan tentang ikhtiar yang hendak dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya menunjukkan pemilihan yang tepat dimulai dari keinginan untuk memperkokoh silaturahmi dan persatuan antar ulama; keprihatinan yang tinggi atas

[29] Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat, hlm. 12.
[30] Tim Penyusun Sejarah Fatayat NU, *Sejarah Fatayat NU,* PP. Fatayat NU: 1984.

permasalahan penyiaran Islam, masalah pendidikan, keadaan yang menimpa kaum fakir miskin serta keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyaraat pada umumnya.

Rumusan-rumusan tersebut menyiratkan keinginan Nahdlatul Ulama untuk merubah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih maju dan sejahtera di atas landasan kokoh keimanan dan akhlak yang mulia. Dengan demikian bisa disebutkan, bahwa sejak awal tujuan untuk membina kualitas hidup manusia dan masyarakat menjadi bagian utama program Nahdlatul Ulama.

Pada tahun 1934, Nahdlatul Ulama mulai membina secara lebih terencana kalangan generasi mudanya, ketika para ulama setuju didirikannya Ansoru Nahdlatoel Oelama (ANO). ANO inilah yang menjadi wadah pembinaan pemuda lingkungan kaum nahdliyin. Kelak Ansor Nahdlatoel Oelama berubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor setelah mengalami restorasi pada tahun 1950-an.

Keterlibatan kaum ibunya juga ditingkatkan. Pada muktamar Nahdlatul Ulama ke 13 di Munas Pandeglang, Jawa Barat. Selain pembicara pria dari pengurus Syuriah dan Tanfidziah, juga ikut berbicara seorang wanita (muslimat) yang dengan menarik mulai meminta kesempatan bagi kaum wanita untuk berkiprah dalam Nahdlatul Ulama. Tokoh tersebut Nyai R. Djunaisih, kelak menjadi perintis berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama. Pada muktamar Nahdlatul Ulama ke 14 di Magelang kaum Muslimat secara hampir resmi ikutserta dalam kegiatan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM) mulai dikenal dan ikut aktif bicara dalam rapat-rapat umum Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 1940, kembali Nyai R. Djunaisih memimpin Muslimat mengadakan resepsi sendiri, diluar kegiatan Muktamar NU pada umunya serta mengadakan rapat-rapat tersendiri pula. Pada muktamar inilah kemudian disepakati adanya pengesahan NUM oleh Muktamar Nahdlatul Ulama serta disepakati adanya Anggaran Dasar NUM oleh muktamar. Selain itu disepakati adanya Pengurus Besar NUM dan lain-lain. Keputusan tersebut bagaimanapun tercatat sebagai saat yang bersejarah yang mengantar lahirnya NUM secara resmi berdasarkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1946 di Purwokerto.

Pada masa pemerintahan Jepang, Muslimat NU berserta organisasi perempuan lainnya mengalami permasalahan besar, yaitu adanya kebijakan dari pemerintah Jepang

untuk meleburkan organisasi perempuan yang bernama *Fujinkai.*[31] Setelah Indonesia merdeka keberadaan Fujinkai pun ikut dibubarkan.

Walaupun belum berbentuk organisasi yang bersifat otonom, NUM ikut berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan bangsa seperti terlibat dalam dapur umum, palang merah, kurir penghubung, bahkan ikut bergabung dengan pasukan perjuangan seperti Hizbullah dan Sabilillah.[32]

Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional, Muslimat NU tidak berjalan sendirian, tetapi juga mengadakan kerjasama dengan organisasi wanita lainnya, seperti: Aisyiyah, Persistri (Persatuan Wanita Persis), perempuan Parta Serikat Islam Indonesia (Wanita PSII). Bahkan, pada tahun 1956, Muslimat NU ikut bergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), yang merupakan sebuah federasi organisasi-organisasi wanita tingkat nasional.[33] Aktivis dan sejarah pergerakan perempuan di Indonesia mencapai puncak pada penghujung tahun 1965.[34] Kendala yang dihadapi pada periode pasca orde lama yaitu terkooptasinya hak perempuan baik secara individu maupun kolektif. Hal ini daapt diungkapkan secara terang benderang oleh kehadiran PKK dan Dharma Wanita. Tujuan didirikan organisasi tersebut adalah bersifat mendampingi suami dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.[35]

Kebangkitan perempuan NU juga membakar semangat kalangan perempuan muda NU yang dipelopori oleh tiga serangkai, yaitu Murthasiyah (Surabaya), Khuzaimah Mansur (Gresik), dan Aminah (Sidoarjo). Pada kongres NU ke 15 tahun 1940 di Surabaya, juga hadir puteri-puteri NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan sendiri yang menyepakati dibentuknya Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Mereka sebetulnya sudah mengajukan kepada kongres NU agar disahkan sebagai

---

[31] Fujinkai merupakan leburan dari sekian banyak organisasi di Indonesia yang sudah ada sebelum masa pemerintahan Jepang. Fujinkai dibentuk tahun 1943 yang anggotanya bersifat wajib untuk para istri pegawai sipil, yang kedudukannya dalam organsiasi tersebut didasarkan pada kedudukan suami masing-masing di dalam hierarki pemerintahan Jepang. Tujuan berdirinya Fujinkai adalah untuk memobilisasi tenaga kerja wanita guna mendukung tentara Jepang dalam perang Asia Raya. Saskia E. Wieringa, *Penghancur Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Garda Budaya, 1999, hlm. 149.

[32] Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Mueleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 84.

[33] Pucuk Pimpinan Muslimat NU, *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama Negara dan Bangsa,* Jakarta: PP Muslimat NU, 1996, hlm. 19.

[34] Sukanti Suryo Chondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 180.

[35] Khofifah Indar Parawansa, *Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2004,* Jurnal *Harkat* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 22.

organisasi yang berdiri sendiri di kongres NU, namun kongres hanya menyetujui Puteri NUM sebagai abgian dari NUM. Dalam dua tahun, Puteri NUM meminta gaar mempunyai pimpinan pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM karena organisasi Puteri NUM di tingkat cabang terus bertambah.

PBNU kemudian menyetujui pembentukan pengurus pusat Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU, yakni sekelompok pelajar putri yang ikut aktif dalam kegiatan Muktamar. Yang diresmikan melalui SK-PBNO No. 574/U/Peb tertanggal 26 Rabi"utstani 1369/14 Februari 1950. Selanjutnya kongres NU ke 18 tanggal 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengesahkan Fatayat NU menjadi salah satu badan otonom NU. Namun berdasarkan proses yang berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, FNU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H.[36]

Dalam lingkungan NU sendiri terdapat Maklumat akan pengakuan tentang kesetaraan gender yang dikeluarkan pada Munas NU di Lombok pada tahun 1997. Munas tersebut melahirkan suatu keputusan atau maklumat tentang "Kedudukan Perempuan dalam Islam" (*Makanah al-Mar"ah fil Islam*). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam lima poin berikut:

a. Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati.
b. Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa.
c. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati.
d. Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domerstiknya.
e. Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.

Maklumat itu sangat strategis dan sangat signifikan, terutama dalam memberi justifikasi upaya-upaya pemberdayaan perempuan di lingkungan NU dalam mengelola

[36] http://fatayat.or.id/sejarah-kelahiran-fatayat-nu/ di unduh pada tanggal 03 Maret 2015 pukul 22.30 WIB

dan mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan.

5. Gerakan Perempuan di PMII (KOPRI)

Pada saat PMII didirikan KOPRI memang belum ada. Yang ada hanya divisi keputrian. Hal ini bukan lantaran peran perempuan sangat kecil, melainkan lebih dikarenakn kepraktisan semata. Maksudnya dalam divisi keputrian ini dikalangan perempuan PMII bisa lebih fokus memusatkan perhatiannya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan dunianya. Sayang, saat itu dunia perempuan hanya sebatas menjahit, memasak dan dapur.[37]

Dalam divisi keputrian tadi, yang menangani semua permasalahan didalamnya tentu saja harus perempuan. Namun walau demikian tidak menutup kemungkinan perempuan menempati posisi di struktur PMII. Tapi lagi-lagi karena kesiapan SDM dan profesionalitas perempuan yang kurang menyebabkan jumlah mereka secara kuantitias masih sedikit. Dimaklumi, karena waktu itu memang sangat sedikit kaum perempuan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi yang terjadi saat itu antara laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu (*guyub*) dalam menutupi kekurangan di organisasi. Termasuk pula *guyub* dalam pengambilan keputusan serta beberapa hal yang mengharuskan mereka bekerja sama mempertaruhkan nama organisasi.[38]

Lahirnya KOPRI berawal dari keinginan kaum perempuan untuk memiliki ruang sendiri dalam beraktifitas, sehingga mereka dapat bebas mengeluarkan pendapat atau apapun. Keinginan tersebut didukung sepenuhnya oleh kaum laki-laki saat itu. Corps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Poetri (COPRI) lahir pada tanggal 25 November 1967 di Semarang, dengan status semi otonom yang sebelumnya merupakan follow up atas dilaksanakannya Training Kursus keputrian di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1966 yang melahirkan Panca Norma KOPRI.[39]

Disisi lain, kondisi gerakan perempuan pada saat berdirinya KOPRI baru sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Misalnya di NU, kita

---

[37] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 3.
[38] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 4.
[39] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 4.

mengenal Muslimat yang hanya mengadakan kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan. Dalam tahap awal berdirinya, KOPRI banyak mengadopsi dan melakukan kerjasama dengan Muslimat, serta beberapa organisasi perempuan lain yang sudah lebih dahulu ada saat itu, seperti Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) maupun Korp HMI-Wati (KOHATI).[40] Pada saat pertama kali berdiri, sebagaimana organisasi perempuan yang ada pada waktu itu, KOPRI hanya semata-mata sebagai wadah mobilisasi perempuan. Alasan mengapa ada KOPRI tak lain karena dirasa perlu untuk mengorganisir kekuatan perempuan PMII untuk bisa menopang organisasi yang menaunginya (PMII). Hal ini seperti juga terjadi di organisasi-organisasi lain baik organisasi mahasiswa, ormas keagamaan, dan organisasi politik.

Akan tetapi ada pada perkembangan selanjutnya menunjukkan hubungan yang dianggap problematis. Dengan gagasan otonomisasi di tingkat pusat (Pengurus Besar) sekilas nampak dualisme organisasi, karena KOPRI memiliki program terpisah dan kebijakan yang berbeda dari PMII. Beberapa kalangan menganggap perkembangan ini sebagai suatu yang positif, karena KOPRI telah bergerak dari organisasi dengan pola ketergantungan terhadap PMII menuju organisasi yang mandiri. Sedangkan kalangan lain menanggapi dengan nada minor, karena KOPRI dianggap melakukan pelanggaran konstitusi dan telah menjadi kendaraan politik menuju posisi strategis di PMII.

Arus gerakan perempuan pada umumnya sangat memberi warna pada perkembangan yang terjadi dalam KOPRI. Untuk menjelaskan bagaimana realitas kondisi KOPRI, tidak lepas dengan bagaimana paradigma gerakan perempuan di Indonesia.[41]

Yang perlu diketahui lagi bahwa historis struktural yang mendorong lahirnya KOPRI sebagai organisasi ekstra kampus yang nota bene merupakan kumpulan intelektual muda, dimana pada perkembangan awalnya perempuan di PMII masih termasuk dalam bidang keputrian. Tapi dengan kebutuhan serta didukung adanya kualitas dan kuantitas yang ada, menimbulkan keinginan yang tidak terbendung untuk mendirikan KOPRI sebagai otonom di PMII. Alasannya adalah sebagai upaya guna peningkatan partisipasi perempuan serta pengembangan wawasan wilayah-wilayah kerja sosial kemasyarakatan.

---

[40] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 18.

[41] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 30-31.

Bentuk dan perkembangan struktur itulah yang kemudian kita mengenal adanya Pengurus Besar (PB), di propinsi ada Pengurus Koordinator Cabang (PKC), kabupaten atau kota ada Pengurus Cabang (PC), terus hingga ke Komisariat atau rayon yang dulunya bernama anak cabang, ranting dan sebagainya.[42]

Orientasi pemikiran sahabat-sahabat pendiri waktu itu dengan dibentuknya KOPRI sebagai organ otonom PMII adalah merupakan keinginan sahabat-sahabat dan kebulatan tekad yang teguh bahwa kaum perempuan cukup mampu dalam menentukan kebijakan tanpa harus lagi mengekor kepada laki-laki. Hal ini bukan berarti KOPRI terpicu oleh keinginan pragmatis dengan berkaca dari organisasi lainnya.[43]

Walaupun KOPRI merupakan bagian dari komunitas NU dan saat itu masih menjadi partai, tetapi tidak ada kaitannya sama sekali. Dengan terbentuknya KOPRI, baik itu alasan politis, kepentingan sesaat, maupun tunggangan ideologi, sekalipun NU merupakan parpol. Pada saat orde baru di bawah kepemimpinan Suharto, trend issu serta suara perempuan pada saat itu turun tensinya dan menuju pada titik kulminasi terendah, sangat melemah. Kondisi saat itu dihisap oleh keberadaan penguasa yang dikenal otoriter serta menghegemoni seluruh kekuatan yang ada di masyarakat. Namun walaupun demikian itu bukanlah masalah yang berarti bagi KOPRI, karena PMII memiliki pola dan karakter gerakan yang massif-agressif, keterpurukan KOPRI itu bisa tertutupi dengan baik.[44] Pada saat kepemimpinan Sahabati Khofifah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1991 mengenai Nilai Kader KOPRI dan pada saat itu pula kaderisasi KOPRI telah dibentuk pola pengkaderan yang sistematis yaitu dibentuk sistem kaderisasi yang terdiri dari Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) serta petunjuk pelaksana Latihan Pengkaderan KOPRI, dalam hal jenjang pengkaderan KOPRI dibagi menjadi 2 tahap yaitu LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI), ini adalah satu bentuk kemajuan kepengurusan KOPRI dari waktu ke waktu.

PMII secara institusi selalu selangkah lebih maju dengan rekapitalisasi gerakan. Tidak demikian dengan KOPRI yang dirasakan justru kehilangan orientasi, dan

---

[42] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 1

[43] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 19.

[44] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 2

mengalami distorsi paradigma gerakan yang dibangun pada saat itu. Tapi karena hubungan antara KOPRI-PMII baik-baik saja, maka secara personal sahabat-sahabat perempuan KOPRI masih sering diajak berurun-berembug, berdiskusi, atau dilibatkan dalam beberapa kegiatan.[45]

Secara struktural KOPRI didalam institusinya berstatus semi otonom atau bagian integral dan tidak terpisahkan dari wadah utamanya yaitu PMII. Lewat semua itu, KOPRI banyak belajar dan menyadari betul tentang perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan. Dan performance pemimpin sangat mempengaruhi gerak dan aktifitas organisasi.[46]

Klaim tentang kesadaran gender pada PMII membangun argumentasi bahwa pembubaran KOPRI merupakan suatu keharusan. Karena KOPRI hanya mengakibatkan eksklusifitas perempuan di PMII. Organisasi perempuan sebagai subordinat dari organisasi lain dianggap memberi legitimasi terhadap streotyp perempuan sebagai makhluk subordinat dan kontra produktif terhadap gerakan perempuan untuk penyadaran, kesetaraan, pemberdayaan akses dan advokasi perempuan.

Cabang-cabang KOPRI yang membuat keputusan untuk meleburkan diri dengan PMII bereksperimen untuk berkompetisi dengan warga PMII lainnya dengan mengandalkan seleksi alam. Kader KOPRI dilanda syndrome inferior untuk menamakan diri sebagai bagian dari KOPRI. Mereka lebih nyaman menjadi PMII atau menjadi bagian dari wadah lain (asal bukan KOPRI). Disisi lain adalah fenomena kemandegan KOPRI, dimana eksis secara struktur tapi tidak melakukan apa-apa dan beberapa cabang KOPRI yang merasa tidak terganggu dan enjoy menjadi bagian dari PMII dengan alasan adanya sinergitas antara PMII dan KOPRI.

Tidak dipungkiri bahwa pembubaran KOPRI pada Kongres XIII di Medan tahun 2000 merupakan salah satu pengaruh dari euforia gerakan kesadaran gender. Selama ini kita merasakan tampak kesenjangan-kesenjangan, tidak hanya antara kader laki-laki dan perempuan, tetapi juga antar daerah. Memang terdapat beberapa eksperimentasi yang dilakukan oleh sebagian kecil daerah (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dengan

[45] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 20.

[46] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 20.

menafsirkannya dalam bentuk jaringan gender sementara daerah lain menjadi tampak kesulitan. Hal ini karena pembubaran KOPRI tidak dibarengi dengan usaha institusionalisasi yang serius ke arah penataan kelembagaan. Sehingga secara institusional yang terjadi bukan memperteguh pemberdayaan kader putri, tetapi meluluh lantakannya kembali ke titik nol. Maka bukan hal yang mustahil manakala ditengah lemahnya mobilitas sosial dan aktualisasi diri akder putri yang secara sosiologis berlatar rural (pedesaan) ada kecurigaan bahwa pembubaran KOPRI adalah "Patriakhal Conspiration". Ibarat perang, kader putri yang memang "dilemahkan berangkat ke medan konstentasi". Mengambil pilihan liberal atau kontestasi bebas ditengah kader yang tidak seimbang oleh kondisi sosial yang timpang/serbalaki-laki memang terlihat naif karena dengan begitu akan menimpakan masalah ketimpangan pada perempuan yang sesungguhnya juga adalah korban (*Blamming the Victim*).[47]

Untuk menunjukkan bahwa PMII adalah organisasi pro-demokrasi dan HAM sehingga tidak memandang laki-laki dan perempuan secara dikotomis. Akan tetapi argumentasi kesadaran gender di PMII terjadi bersamaan dengan fenomena-fenomena sebagai berikut: pertama, marginalisasi perempuan di kepengurusan PMII di setiap level kepengurusan. Kedua, munculnya krisis kader perempuan dalam PMII yaitu terjadinya gap antara jumlah anggota perempuan yang aktif dengan jumlah anggota yang pasif. Pada saat dilakukan MAPABA di PMII biasanya separoh atau lebih merupakan kader perempuan. Mayoritas dari mereka hanya sempat mengikuti MAPABA, dan setelah itu seleksi alam akan menentukan apakah seorang kader perempuan akan bertahan atau tidak. Ketiga adalah kader putri yang melakukan pembaharuan melalui KOPRI terutama di PB KOPRI dan cabang-cabang PMII yang masih mempertahankan KOPRI. Aktifitas KOPRI melihat bahwa di tubuh PMII kesadaran gender terjadi bersamaan dengan ketimpangan gender yang tercermin dari ketidakjelasan kebijakan PMII terhadap kader perempuan yang jumlahnya melebihi 50% dari kader PMII seluruhnya. Hal ini disebabkan karena PMII merupakan organisasi secara idealitas tidak membedakan kader laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ditingkat realitas menunjukkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kader perempuan PMII tidak memiliki

[47] PB PMII, *Hasil-Hasil Kongres XIV, Mukernas dan Pokja Perempuan PB PMII 2003-2005*, Jakarta: PB. PMII, 2005, hlm. 135-136.

landasan konstitusional yang jelas dalam memperjuangkan aspirasi perempuan.[48] Berdasarkan forum musyawarah yang diamanatkan oleh Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur untuk membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII pada tanggal 26-29 September 2003 yang menghasilkan ketetapan bahwa dibentuk kembali keorganisasian wadah perempuan yang bernama KOPRI (Korps PMII Putri) yang merupakan bagian integral dengan PMII di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dimana PB KOPRI berpusat di Jakarta. Dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan misinya adalah mengidiologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.[49] Ketika PMII berusaha untuk memaksimalkan kader-kader perempuan PMII untuk mampu bersaing dan mandiri dengan membentuk badan semi otonom yaitu KOPRI, tetapi keberadaannya tidak dapat dirasakan oleh kader-kader PMII secara keseluruhan baik itu laki-laki maupun perempuan apalagi masyarakat yang lebih luas, keberadaan KOPRI seperti "Hidup segan mati tak mau". Masing-masing daerah belum terkonsentrat dalam hal sistem kaderisasi KOPRI karena minimnya pemahaman mengenai KOPRI itu sendiri, padahal pada masa kepemimpinan Sahabati Khofifah sudah dibentuk Latihan Kader KOPRI (LKK) dan Latihan Pelatih Kader KOPRI (LPKK), namun seiring berjalannya

waktu, masing-masing daerah membentuk sistem kaderisasi KOPRI sendiri dengan mengikuti perkembangan waktu dan pemahaman dari setiap kader di daerah, seperti di KOPRI PKC Jawa Barat membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKK (Sekolah Kader KOPRI) I, SKK II, dan SKK III mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII. Kemudian KOPRI PC Kota Malang membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKP (Sekolah Kader Putri) I, SKP II dan SKK begitupun KOPRI PC. Kota Malang mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII.

Untuk mempermudah mempelajari sejarah gerakan KOPRI, dapat dilihat pada kolom dibawah ini:

No.	**Periodesasi**	**Bentuk Gerakan**	**Gagasan**

[48] PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 36-37.

[49] PB PMII, *Hasil-Hasil Kongres XIV, Mukernas dan Pokja Perempuan PB PMII 2003-2005*, Jakarta: PB. PMII, 2005, hlm. 244-245.

1.	1960-1966	Divisi Keputrian	Gerakan perempuan PMII lebih fokus memusatkan perhatian menangani masalah-masalah perempuan dan sebatas menjahit, memasak dan mengenai masalah dapur.
2.	16 Februari 1966	Training Kursus Keputrian	Panca Norma KOPRI dan menelurkan gagasan pembentukan badan Semi Otonom PMII (KOPRI)
3.	25 November 1967	Dibentuk KOPRI	Mengorganisir kekuatan kader perempuan PMII serta menjadi ruang gerak dalam mengeluarkan pendapat dan beraktifitas sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan masyarakat.
4.	1988		Dibentuk sistem kaderisasi yang sistematis terdiri dari Kurikulum dan Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI).
5.	28 Oktober 1991		Lahir NKK (Nilai Kader KOPRI)
6.	2000	KOPRI dibubarkan	Pembubaran KOPRI pada Kongres XIII tahun 2000 di Medan.
7.	2003	Amanat Pertemuan POKJA Perempuan	Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur mengamanatkan membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII
8.	26-29 September 2003	Pertemuan POKJA Perempuan	Gagasan dilahirkan keorganisasian wadah perempuan.
9.	29 September 2003	KOPRI	Dibentuk kembali keorganisasian wadah perempuan yang bernama

			KOPRI (Korps PMII Putri) dengan Visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Misinya adalah mengidiologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender.
10.	2003-2014	KOPRI	KOPRI daerah masing-masing membuat sistem kaderisasi KOPRI (Tidak terkonsentrasi pada modul tunggal kaderisasi KOPRI).
11.	2014	Kongres XVII di Jambi	Lahirnya IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI
12	2014 - 2016	KOPRI	KOPRI PB PMII mensistematiskan modul tunggal kaderisasi nasional KOPRI

a. **Panca Norma KOPRI**

Panca Norma KOPRI dicetuskan pada tanggal 16 Februari 1966 pada saat pelaksanaan Training Course Keputrian I PMII di Jakarta bersamaan dengan pelaksanaan Mukernas I, yang berisi sebagai berikut:[50]

a. Tentang Emansipasi
   - Emansipasi wanita berarti memberikan hak-hak dan kesempatan kepada wanita sederajat, setingkat dan seirama dengan kaum pria. Bukan merupakan

[50] PB PMII, Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta:1985. (Dicetuskan pada Training Course Keputrian PMII tanggal 16 Februari 1966 di Jakarta).

pemberian hak-hak istimewa karena penghargaan atau perbedaan naluri fitriahnya justru karena dia wanita.

- Tuntutan akan hak-hak wanita, meliputi segala segi kehidupan baik politik sosial ekonomi, maupun kebudayaan. Hak-hak ini diberikan adalah merupakan tuntutan nurani yang mendorong manusia berkeinginan, berkehendak dan berbuat sebagai realisasi dan manifestasi dari pada ajaran Islam.
- Perjuangan hidup baik di dalam bidang politik, sosial ekonomi maupun kebudayaan adalah suatu tuntutan yang bagi kita mempunyai ukuran-ukuran yaitu yang didasarkan atas perbedaan struktur rohaniah jasmaniah dan kondisi ruang dan waktu.
- Pembatasan atas hak adalah kewajiban yaitu suatu langkah dan tindakan yang harus ditempuh lebih dulu. Ini berarti bahwa kewajiban harus mendapat tempat yang lebih utama daripada tuntutan akan hak.
- Manifestasi daripada itu ialah pengorbanan kaum perempuan untuk berjuang menyelami dan terjun dalam langkah perjuangan politik, sosial ekonomi, kebudayaan, dalam mana kewajiban seorang putri telah terpenuhi dan akan berjalan seiring dengan hak-hak yang dituntutnya.

b. Tentang Etika Wanita Islam

- Ajaran tentang hak batal, benar salah, baik buruk, bermoral immoral adalah suatu persoalan etika. Etika yang dimaksudkan adalah Al-Qur"an dan Assunnah, yaitu etika Islam. Etika yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, baik dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan maupun berhubungan antar manusia dengan manusia, dan perkembangan kebudayaannya.
- Pengabdian kepada Tuhan adalah suatu bentuk pengabdian yang tertinggi dan merupakan gerak hidup yang disandarkan atas taqwallah dengan beramar ma"ruf nahi munkar membabat jiwa keimanan, keikhlasan serta tawadlu" dan khusuk.
- Hubungan antar manusia diperlukan keharmonisan, keserasian dan penyesuaian akan arus perkembanagan dan perubahan zaman berpegang

kepada ajaran agama dan etiket pergaulan adalah suatu kemutlakan, sehingga pprinsip perorangan yang tidak hanyut terseret oleh arus yang tanpa arah dapat terkendalikan secara positif.

- Etiket pergaulan yang diartikan dengan "Tata Cara Pergaulan" mempunyai arti relatif, anggapan sopan bagi suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain, dan pandangan benar bagi suatu ajaran pun menempatkan hal yang sama. Garis penegas yang positif bagi realisasi bentuk-bentuk itu adalah pandangan agama, suatu ajaran yang mempunyai norma-norma hukum nasional maupun internasional.
- Arus budaya yang senantiasa berkembang akan senantiasa mendapatkan tempat dalam masyarakat. Posisi menarik bukan lebur tertarik adalah suatu norma bagi PMII, perkembanagn budaya sebagai hasil pikiran harus diarahkan, diisi dan dijiwai ajaran agama, moral nasional dan kepribadian bangsa.

c. Tentang Watak PMII Putri dalam Kesatuan dan Totalitas Berorganisasi

- PMII Putri adalah bagian dan organ organisasi yang tak terpisahkan dari PMII. Ia sebagai organ bukan merupakan kesatuan yang terpisahkan dan berdiri sendiri dalam kesatuan tubuh. Tetapi ia merupakan suatu paduan dan persenyawaan yang tanpa melarutkan sifat dan ciri-ciri kewanitaannya yang dibawanya sebagai fitrah dan kondisi potensial yang dimilikinya.
- Sebagai organ yang tak terpisahkan ia melakukan perjuangan yang senada dan seiring, selangkah dan seirama, maju dalam berbagai bidang tujuan organisasi, bidang kepemimpinan dan interdepartemental merupakan suatu bentuk-bentuk lapangan perjuangan yang mendapat sorotan dan hak memanfaatkan akan perjuangan yang mendapat akan tuntutan sosial wanita dimana tugas-tugas dan peranan organisasi tak dibedakan.
- Sebagai mahasiswa putri Islam, walaupun merupakan kesatuan organ yang tak terpisahkan, tetapi ia mempunyai sikap hidup dan pandangan dan langkah serta tindakan yang berbeda dengan mahasiswa-mahaiswa di luar islam, bahkan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa putri di luar Ahlussunnah Wal Jamaah.

- Suatu kesatuan dalam totalitas berorganisasi adalah suatu bentuk antara PMII putri dan PMII putra merupakan suatu paguyuban. Tetapi garis pemisah yang terbatas dengan norma dan kaedah-kaedah agama suatu tuntutan mutlak yang memberikan tabir dan benteng ukuran moral dan watak positif sehingga moral dan amalan syariat Islam terjamin karenanya.

d. Tentang Partisipasi PMII Putri terhadap Neven-neven Organisasi

- Sebagai organ yang memihak pada ideologi partai maka neven organisasi yang berafiliasi terhadap partai adalah juga alat perjuangan yang senada dan seirama, seiring dan berdampingan dalam mencapai tujuan bersama dan tujuan yang sama.
- Sikap masa bodoh, sikap rendah diri, sikap penakut dan nrimo adalah suatu bentuk yang tidak seharusnya ada bagi PMII Putri, justru emansipasi wanita maka sifat-sifat kerendahan itu dapat dilenyapkan.
- Atas dasar tanggungjawab yang mendalam terhadap agama, bangsa dan revolusi, maka partisipasi terhadap neven-neven organisasi sebagai alat partai dan revolusi terutam organisasi wanita adalah kemutlakan yang tak dapat dielakan adanya.
- Usaha-usaha konkrit kearah itu dapat dilakukan ialah turut meningkatkan kemampuan-kemampuan dan daya perjuangan dalam berorganisasi khususnya terhadap Muslimat, Fatayat, IPPNU baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, perkembanagan kebudayaan, maupun dalam bidang-bidang yang lebih luas dengan didasarkan atas kondisi, tempat dan waktu sekarang.
- Bidang-bidang praktis yang dapat dilakukan dlam usaha partisipasi ini meliputi bidang-bidang organisasi, administrasi, latihan-latihan kepemimpinan, pendidikan dan pengajaran, keubudayaan, dakwah Islam dalam perkembangan organisasi, maupun dalam berbagai bentuk sosial kemasyarakatan yang lain yang menyangkut peri hidup wanita dalam hubungannya dengan perjuangan agama dan revolusi.

e. Tentang Partisipasi PMII Putri terhadap Kegiatan-kegiatan Masyarakat

- Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan suatu amanat Tuhan. Ia merupakan amal ibadah kalau pengabdiaannya itu diiringi niat yang ikhlas dan

pembaktian kepada Tuhan. Jurang pemisah anatara perkuliahan dan masyarakat mutlak ditolak dan organisasi berarti jembatan emas penghubung antara keduanya.

- PMII Putri sebagai mahasiswa dan anggota masyarakat, akan menyatukan dwi tunggal antara ilmu dan amal, antara teori dan perbuatan, berusaha merelaisasikan satunya kata dan perbuatan serta ikut serta secara aktif dalam seluruh kegiatan dan aktifitas masyarakat selagi ia tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
- PMII Putri sebagai wanita realistik, mampu menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan, dan tugas-tugas ini akan diselesaikan kalau tugas-tugas dan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat itu semata-mata mengarah kepada kepentingan agama, nusa, bangsa dan revolusi.
- Secara konkrit ia akan mendharmabaktikan dalam seluruh bentuk kehidupan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun dalam perkembangan kebudayaan.
- Suatu pembaktian yang mesti dituntut lebih dahulu agar tidak menyimpang dari norma-norma agama, revolusi dan kemasyarakatan, adalah usaha mutlak untuk mempelajari hukum-hukum dan ajaran agama. Doktrin revolusi dan pengetahuan masyarakat Indonesia.

b. NKK (Nilai Kader KOPRI)

Nilai Kader KOPRI atau biasa disingkat dengan NKK merupakan sebuah sarana kader KOPRI untuk mengenal, melihat dirinya sendiri dan bahkan mengharapkan yang lain untuk melihat. NKK juga merupakan potret yang diharapkan.

Untuk menjawab pertanyaan “Siapa saya ini” maka NKK mengembangkan sebagai berikut:

a. Warga KOPRI sebagai insan individu harus dipenuhi dengan muatan religiusitas karena islamnya, harus dipenuhi dengan muatan intelektualitas karena mahasiswa, dan juga harus dipenuhi dengan muatan kemandirian karena kedewasaannya.
b. Warga KOPRI sebagai makhluk sosial, tanpa membedakan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta melihat dimensi ruang dan waktu.

c. Warga KOPRI sebagai insan organisasi, harus mengembangkan sikap profesionalitas dalam menjalankan aktifitas.

Fungsi dari NKK ini yaitu:

a. Sebagai justifikasi terhadap tertib sosial dan tertib organisasi yang mensyaratkan pada anggota untuk menerima.
b. Sebagai konstruk yang sah dan dianggap vital secara moral mengikat. Jadi setiap tindakan harus berada dibalik legitimasi NKK.
c. Mampu menumbuhkan "sens of belonging" warga terhadap organisasi yang mempertautkan kolektifitas masa lampau sekaligus diarahkan pada masa depan sebagai pengidentifikasian diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.
d. Sebagai pedoman yang memberikan wawasan mengenal misi dan tujuan organisasi sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak.

Berangkat dari pemikiran di atas maka Nilai Kader KOPRI dirumuskan sebagai berikut:

a. Modernisasi

Modernisasi telah mampu mengembangkan suatu kultur dengan menempatkan bentuk rasionalitas tertentu sebagai nilai yang menonjol tapi dalam beberapa hal sering gagal, karena rasionalitas itu kurang bisa dipaksa sebagai panutan yang tepat. Meskipun begitu rasionalitas dalam beberapa segi telah mampu mengganti semangat keagamaan.

Modernisasi seringkali ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata mampu merubah beberapa pandangan manusia dalam beberapa masalah kehidupan mereka, akibatnya manusia seringkali mengidiologikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sembahan kehidupan. Menghadapi fenomena demikian, maka sikap KOPRI menerima modernisasi secara selektif mana yang harus diambil.

b. Mitra Sejajar

- Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kodrat yang berbeda, namun sama-sama mempunyai tanggungjawab kekholifahan. (Q.S 8: 165)

- Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama seimbang. (Q.S 2: 228)
- Mempunyai kesempatan beraktifitas dan berjuang serta akan diperhitungkan prestasi kerjanya. (Q.S 4: 32)
- Antara laki-laki dan perempuan saling melindungi. (Q.S 9: 71)
- Antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. (Q.S 2: 167)

c. Wanita Ideal
- Sholihah, taat, dan menjaga diri dengan baik. (Q.S 2: 34)
- Beriman, tunduk, jujur, khusuk dan dermawan, menjaga kehormatan dan banyak berdzikir kepada Allah. (Q.S 33: 35)
- Memiliki pribadi yang dinamis dan kreatif ditunjang dengan tindakan, intelegensi dan kasih sayang.
- Memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari keterbatasannya, menembus ruang dan waktu untuk meningkatkan kehidupan sosial.

d. Watak KOPRI
- KOPRI dalam melakukan kegiatan tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya.
- KOPRI mempunyai tindakan, pandangan dan langkah yang berbeda dengan mahasiswi non Islam, bahkan di luar Ahlussunnah Wal Jamaah pun harus beda.

c. Ideologi Politik Organisasi (IPO) KOPRI

Ideology-Politik-Organisasi KOPRI

Semakin merasa "lemah" seorang hamba, semakin kuat pula keinginan untuk "memuji". Akhirnya bentuk penghambaan terhadap Tuhan bermetamorfosa menjadi penghambaan terhadap penguasa. Kekuasaan agama teralih --*secara tak sadar*-- *pada kekuasaan politik* [*Hassan Hanafi*]

Perkembangan sejarah manusia adalah *min lawazim al-hayah*, seperti halnya perkembangan pengalaman hidup bernegara umat manusia yang semula cuma kumpulan dari

tribes (suku-suku*; qabilah*) ke pembentukan *ummah,* dan kemudian dari *ummah* berkembang ke pendirian negara-bangsa (*nation-states*) seperti saat sekarang ini. Bahkan sekarang mengarah ke pasca *nation-states*, yang biasa disebut global. Masing-masing fase mempunyai karakteristik sendiri-sendiri sejak dari sistem hukum, sosial, budaya, ekonomi termasuk agama. Dalam proses perkembangan seperti itu, *continuity* (kesinambungan) dan *change* (perubahan), dan perkembangan dan transformasi (*development*), pada porsinya, adalah sebuah keniscayaan.

Pada tataran praksisnya, tiga proses itu pun berlaku bagi setiap entitas, kelompok, atau bangsa manapun di dunia ini, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alam, namun bukan negara yang makmur. Indonesia termasuk negara miskin yang kemudian dieufinisme-kan menjadi negara berkembang. Indonesia hanyalah negara yang ada di titik pinggiran, yang menyediakan kekayaan alamnya untuk disedot ke pusat-pusat negara maju dengan cara meminjam uang ke negara-negara maju dan dengan penanaman modal asing. Penduduk yang besar dan kekayaan yang melimpah justru menjadi hadiah berharga bagi negara-negara maju: dulu, kolonialisme fisik dan sekarang, imperialisme neoliberal.

Globalisasi neoliberal adalah ideologi lanjutan dari kapitalisme yang saat ini sedang diadopsi oleh sebagian besar negara-negara berkembang dan telah dipraktekkan oleh negara-negara maju. Ideologi ini didukung oleh pilar-pilar badan dunia, seperti: Bank Dunia, IMF, WTO, dan perusahaan-perusahaan transnasional. Neoliberal ini memperjuangkan sepenuhnya pasar bebas dan tidak mempercayai perlunya "pemerataan". Lagi, ia merupakan bentuk lain dari imperialisme Barat ke negara-negara belahan bumi selatan di abad ke-18, 19, dan 20, termasuk di nusantara ini: sama-sama digerakkan oleh negara-negara maju.

Di tengah posisi bangsa dan dunia yang demikian, dalam hierarki sosial di antara kelompok-kelompok lain, terdapat sebuah kelompok yakni komunitas NU, berada dalam posisi bawah: berada di desa-desa dan berbasiskan petani, pedagang, serta nelayan kecil. Mereka inilah (baca: basis komunitas NU terbesar) yang mengalami akumulasi kemiskinan laten, yang disuburkan oleh minimnya akses tanah dan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ke teknologi tinggi padat modal. "Komunitas NU" tengah menghadapi masalah serius pada hari ini dan di masa mendatang. Sebab, masyarakat NU ditempatkan dalam kerangka: sebagai komunitas yang menjadi bagian dari bangsa besar bernama Indonesia yang juga bagian dari bangsa-bangsa

di dunia; dan sebuah komunitas bersama kelompok-kelompok lain yang menyangga bangsa yang bernama Indonesia.

Dalam hiruk pikuk kehidupan bangsa ini, dalam pelbagai pergumulan multidimensionalnya, NU seolah-olah tak pernah terpisahkan dalam gerak dan langkah keorganisasiannya vis-à-vis negara. Paling tidak, dalam satu dasawarsa ini, kita menyaksikan dinamika pemikiran Islam di kalangan intelektual muda NU yang berlangsung dalam suasana penuh gairah. Di banyak sudut dan ruang komunitas, anak-anak muda NU terpelajar --hampir setiap hari-- berlangsung perdebatan-perdebatan intelektual yang sungguh menakjubkan; progresif dan bebas. Semangat intelektualisme dan implementasinya dalam laku pergerakan (*movement*) yang didesain dam disuguhkan mereka kembali mengingatkan kita bahwa masih ada harapan yang dapat diretas untuk entitas yang bernama Indonesia, Islam --dan lebih khusus lagi NU-- di masa depan.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, selanjutnya disebut PMII, merupakan organisasi di tingkatan mahasiswa --yang mayoritas dari mereka-- memliki latar belakang kultur keagamaan NU. Mereka, dalam pergulatan pikir dan geraknya, mengusung isu-isu kontemporer sekaligus menggugat kemapanan-kemapanan intelektual dan kekakuan-kekakuan konservatisme. PMII memposisikan dirinya sebagai kelompok muda NU progresif yang berada pada dinamika pergulatan Negara dan masyarakat. PMII hadir sebagai alat pengontrol sekaligus penekan basis atas untuk kepentingan masyarakat atau kelas bawah.

Indonesia dan pilihan sistemiknya seperti yang telah diuraikan diatas, berada pada situasi yang akut, dimana system kapitalis neoliberal yang masuk ke sendi-sendi Negara semakin merajalela. Imbas dari konspirasi perselingkuhan tersebut maka, posisi yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat bawah tidak terkecuali perempuan didalamnya. Kemiskinan, kebodohan, terusir, biaya yang mahal, penindasan dan lain sebagainya seakan menjadi tontonan sehari-sehari di republic ini. Ini adalah tantangan serius yang dihadapi bangsa ini.

Pada situasi demikian, maka yang paling diharapkan untuk bisa melawan dan mengikis system yang akut tersebut adalah kekhususan kontradiksi yang ada,atau bisa disebut juga kehendak masyarakat, individu dan alat perjuangan yang mempunyai kesadaran untuk berlawan terhadap penjajahan gaya baru kapitalis neoliberal. Kalau ini dibiarkan maka harapan

kesejahteraan dan tatanan yang adil tidak akan pernah terlaksana. Kekhususan kontradiksi terpancar dari dialektika organisasi yang mampu mengakumulasi kekuatan kesadaran individunya menjadi sebuah gerak perlawanan yang militant. Maka, penguatan kapasitas individu, alat perjuangan dan pilihan ideology-politik-organisasi untuk melancarkan serangan tersebut harus tepat sesuai dinamika perkembangan yang ada.

Dalam sejarah gerakan kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan Negara-negara maju, dibutuhkan kecermatan analisa, taktik strategi dan landasan ideologis yang jelas untuk mengintervensi kesadaran massa akan pentingnya arah dan tujuan gerakan, kita lihat misalkan gerakan mengusir penjajah belanda dari Indonesia yang dikawal oleh soekarno, termasuk juga pendiri NU yakni KH. Hasyim Asy"ari. Mereka sangat gigih dan lantang dengan konsepsi Nasionalis-marhaen dan religious-mustadl""afin sebagai manifestasi yang harus tercipta dalam tatanan bangsa kedepan. Begitupun juga dibelahan Negara lain, lenin dengan konsep marxis-sosialisnya berhasil meruntuhkan rezim dikator tzar, Iran dengan revolusi islamnya,Venezuela dengan revolusi sosialisnya dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa sangat urgen sebuah landasan dan taktik strategi yang sistematis dalam organisasi atau gerakan perlawanan untuk mengusir penjajah atau musuh yang menyengsarakan rakyat.

PMII sebagai organisasi kader yang menganut ideology ahlusunnah wal jama""ah, seharusnya mampu menjadi dinamisator gerakan perubahan untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang ditekankan oleh aswaja itu sendiri.

Aswaja dengan pilar dan prinsipnya mengharuskan cara berfikir bagi penganutnya untuk selalu sadar dan respon akan perkembangan kehidupan yang terjadi dan permasalahannya, kemudian memberikan solusi atasnya. Aswaja hadir dalam tubuh PMII sebagai landasan dan corong berfikir kader untuk melakukan perubahan kebaikan dalam tata masyarakat yang berkembang. Dalam prinsipnya, al-khuriyah, al-„adalah dan al-musawwamah (Pembebasan/kemerdekaan, keadilan dan kesetaraan) aswaja hadir bukannya berdimensi dengan nuansa spiritual, akan tetapi harus mampu tampil sebagai narasi yang bisa memberikan solusi untuk bangsa terkait mengenai masalah muamalah, dan ini lebih dominan.

KOPRI yang juga bagian dari instrument ideology aswaja hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait

kebutuhan mendasar bagi pembebasan kaum perempuan. Dimana ketidak adilan terhadap perempuan semakin merajalela di bumi ini, marginalisasi, stereotype, subordinasi/penaklukan/penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Seperti yang diungkapkan hasan hanafi diatas, perempuan harus kuat dan progresif serta menolak ketertundukan yang menyebabkan keterpurukan bagi kaumnya. Dengan hal tersebut, maka perempuan harus bisa mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk bumi ini. Dan tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ideology yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis dan organisasi/alat perjuangan yang kuat untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

Garis Perjuangan Politik yang Tegas

Setiap organisasi harus mempunyai pandangan dan garis perjuangan yang jelas, dalam arti sederhana; cita-cita untuk kebaikan bersama umat manusia. setelah selesai secara ideology maka, sebuah ketegasan dari cita-cita perjuangan politik mutlak harus terlaksana. Seperti penguraian diatas, perjuangan dikarenakan ada sebuah musuh atau bisa juga kita mengandaikan musuh.

Dalam prinsip aswaja dan pilarnya; pembebasan, keadilan dan kesetaraan mutlak menghadirkan musuh yang harus kita kikis habis keberadaan dan ruang geraknya. Karena akar masalah yang menyebabkan terjadinya degradasi kemanusiaan yang terjadi (baik terhadap laki-laki maupun perempuan) adalah bergerak bebasnya musuh rakyat yang menguasai seluruh sendi-sendi bangsa dan Negara, ini juga tidak terkecuali perempuan.

1. Budaya Patriarki

   Budaya yang menomorduakan posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai entitas masyarakat yang inferior. Inilah yang kemudian menghambat perempuan untuk maju.
2. Kapitalisme

   System ekonomi kapitalis (yang menghendaki nilai lebih), dalam islam disebut juga riba, mendapatkan hidup dari hasil ekploitasi sumberdaya yang terus-menerus demi kepentingan akumulasi dan juga penghisapan manusia antar manusia. Dengan penguasaan dan kepemilikan individu yang lebih, Kekayaan yang dikumpulkan hanya

dinikmati oleh beberapa gelintir orang saja. Akhirnya perempuanlah yang menjadi korban paling utama dengan system tersebut. Perempuan hanya menjadi objek dan komoditi dari kepentingan modal mereka, perempuan dijadikan pekerja penurut dengan upah yang murah.

3. Fasisme Religius

   Ini adalah istilah baru yang lebih maju dari devinisi radikalisme dan fundamentalisme. Fasisme sendiri adalah sebuah system yang dibangun oleh kelompok borjuis kecil dan tengah eropa untuk menguasai Negara. Fasisme juga bisa dikatakan sebagai penguasaan atau kediktatoran penuh yang reaksioner. Adapun ciri-ciri dari fasisme religious adalah :

   - *Gerakannya mengambil bentuk mobilisasi massa di jalanan*; Contoh; militer, FPI, HTI, dll

     (isu-isu yang diusung : anti pluralisme, anti demokrasi, anti liberalisme,dll).
   - *Percaya pada keagungan sistem dan nilai-nilai sosial masa lalu;*

     (seperti konsep khilafah, kehebatan kepemimpin masa lalu dll)

Tindakan fasisme religious sangat merugikan perempuan, dengan claim kebenaran tafsir yang mereka suguhkan, apa yang kemudian dilakukan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contohnya adalah serangan brutal yang dilakukan oleh FPI dan kelompok kanan lainnya terhadap ideology atau faham yang dianggap sesat (ILGA, Ahmadiyah, Komunisme dll), penerapan perda di beberapa wilayah di Indonesia; dengan dalih kemuliaan untuk perempuan, perempuan terbelenggu dalam ruang public dan mengembalikannya ke ranah domestic. Bukan hanya itu, penafsiran mereka yang dianggap sebuah kebenaran tunggal dalam membolehkan poligami dan etika perempuan menjadikan perempuan terkurung dalam ruang yang sama sekali jauh dari esensi kehidupannya.

Kunci memenangkan pertarungan dengan kelompok kanan radikal/Fasisme Religius ini tergantung pada dua hal berikut:

- *Seberapa mampu gerakan progresif membangun basis massa yang terorganisir dan berkesadaran kritis;*
- *Seberapa mampu kaum progresif memenangkan pertarungan di jalan-jalan.*

4. Imperialisme

   Imperialisme atau disebut juga penjajahan gaya baru atau penjajahan non fisik, imperialisme adalah bergeraknya modal asing yang sangat bebas untuk menguasai sumber daya alam dan asset-aset masyarakat. Metode yang dilakukannya adalah melalui kerjasama investasi atau pembelian aset-aset kepemilikan Negara/masyarakat (kepemilikan produksi emas, baja, minyak, telekomunikasi dan lainnya oleh pemodal besar dan Negara maju) dan pemberian utang yang menjerat Negara dan rakyatnya. Sehingga kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kriminalitas semakin merajalela di Negeri ini. Disinilah perempuan juga terkena dampak yang sangat serius, khususnya ibu rumah tangga yang kesehariannya berjibaku dengan kebutuhan pokok keluarga.

Ketika keempat musuh tersebut masih bertahan dan merajalela, maka sebuah keniscayaan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan tercipta di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai ini. Dari keempat musuh yang diuraikan diatas, satu-satunya jalan untuk melawannya adalah keseriusan dari individu dan organisasi kita yang tertuang dalam landasan ideology yang jelas kemudian diteruskan dengan taktik strategi organisasi yang sistematis.

d. Tokoh-Tokoh KOPRI

KETUA PMII DAN KETUA KOPRI

PERIODE 1960-2016

A. Periode 1960-1961

Hasil Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin di Surabaya 14-16 April 1960:

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : H. Said Budairi

Departemen Keputrian : Mahmudah Nahrowi

B. Periode 1961-1963

Kongres I PMII di Tawangmangu Surakarta Jateng Desember 1961:

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : H. Said Budairi

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

C. Periode 1963-1967

Kongres II PMII di Kaliurang Yogyakarta 25-29 Desember 1963:

Ketua Umum PMII : Mahbub Junaidi

Sekretaris Umum : Harun Al-Rasyid

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

D. Periode 1967-1970

Kongres III PMII di Malang Jawa Timur 7-11 Februari 1967:

Ketua Umum : M. Zamroni

Sekretaris Umum : Fahmi Ja‟far

Departemen Keputrian : Tien Hartini

PP Badan KOPRI :

(Hasil Mukernas II PMII Semarang 25 November 1967)

Ketua Umum : Ismi Maryam BA

Sekretaris Umum : Maryamah BA

Kedudukan : di Jakarta

Catatan : berdasarkan keputusan Mubes I PMII di Leles Garut Jabar 20-27 Januari 1969 KOPRI berpindah kedudukannya di Surabaya Jawa Timur

E. Periode 1970-1973

Kongres IV PMII di Makasar Ujungpandang 25-30 April 1970:

Ketua Umum PMII : M. Zamroni

Sekretaris Umum : Madjidi Syah

Departemen Keputrian : Enny Suhaeni

PP Badan KOPRI

Ketua Umum : Adibah Hamid

Sekretaris Umum : Aminah Asraf BA

Kedudukan : Surabaya Jatim

F. Periode 1973-1977

Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat 23-28 Desember 1973:

Ketua Umum PMII : Abduh Paddare

Sekretaris Jenderal : Ahmad Bagdja

Sekbid Keputrian : Wus‟ah Suralaga

G. Periode 1977-1981

Kongres VI PMII di Wisma Tanah Air Jakarta 8-12 Oktober 1977:

Ketua Umum PMII : Ahmad Bagja

Sekretaris Jenderal : Muhyidin Arubusman

Sekbid KOPRI : Fadilah Suralaga

Resuffle : Ida Farida

(*Fadilah Suralaga naik sebagai Ketua IV Bidang KOPRI*)

H. Periode 1981-1984

Kongres VII PMII di Pusdiklat Pramuka Cibubur Jakarta 1-5 April 1981:

Ketua Umum PMII : Muhyidin Arubusman

Sekretaris Jenderal : H. Tahir Husien

Ketua Bidang KOPRI : Fadilah Suralaga

Sekbid KOPRI : Lilis Nurul Husnaputri

I. Periode 1985-1988

Kongres VIII PMII di Bandung Jawa Barat 16-20 Mei 1985:

Ketua Umum PMII : Surya Darma Ali

Sekretaris Jenderal : M. Isa Muhsin

Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iis Kholilah

Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Dede Mahmudah

Hasil Resuffle:

Ketua IV PMII (Bid KOPRI) : Iriani Suaidah

Sekretaris VIII PMII (Bid KOPRI) : Hj. Siti Ma‟rifah

J. Periode 1988-1991

Kongres IX PMII di Wisma Haji Surabaya Jawa Timur November 1988: Ketua Umum PMII : M. Iqbal Assegaf

Sekretaris Jenderal : Abd. Khalik Ahmad

Ketua KOPRI : Khofifah

Sekretaris Bid KOPRI : Ulha Soraya

(*Pada Kongres ke IX di Surabaya ini KOPRI dibentuk kembali*)

K. Periode 1991-1994

Kongres X PMII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 21-27 Oktober 1991:

Ketua Umum PMII : Ali Masykur Musa

Sekretaris Jenderal : M. Syukur Sabang

Ketua KOPRI : Jauharoh Haddad

Sekretaris KOPRI : Siti Khadijah RM

Catatan: pada Kongres ke X ini awalnya kandidat calon ketua KOPRI ada 3 calon, yaitu: Calon dari Surabaya, Calon dari Yogyakarta dan Calon dari Lampung. Dua calon pertama mengundurkan diri sehingga tinggal satu calon yaitu calon nomor 3 dari Lampung, Jauharoh Haddad.

L. Periode 1994-1997

Kongres XI PMII di Samarinda Kalimantan Timur 29 Oktober-3 Nopember 1994:

Ketua Umum PMII : A. Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal : Rusdin M. Noor

Ketua KOPRI : Diana Mutiah

Sekretaris : -

M. Periode 1997-2000

Kongres XII PMII di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Jawa Timur 1997: Ketua Umum PMII : Syaiful Bahri Anshori

Sekretaris Jenderal : Usman Sadiqin

Ketua KOPRI : Luluk Nurhamidah

Sekretaris KOPRI : Wahidah Suaeb/Erni Sugiyati

N. Periode 2000-2003

Kongres XIII PMII di Medan Sumatera Utara 2000:

Ketua Umum PMII : Nusron Wahid

Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

KOPRI : Bubar

Catatan : KOPRI dibubarkan pada forum Kongres ini melalui voting yang hanya beda 1 suara antara yang setuju dibubarkan dan yang menolak dibubarkan.

O. Periode 2003-2005

Kongres XIV PMII di Kutai Kertanegara Kalimantan 2003:

Ketua Umum PMII : Malik Haramain

Sekretaris Jenderal : Isra D. Pramulyo

Ketua KOPRI : Wiwin Winarti

Sekretaris KOPRI : Nina Hunainah

Catatan : KOPRI dibentuk kembali dengan status Semi Otonom, berdasarkan hasil POKJA amanat Kongres XIV PMII 2003. Forum POKJA Perempuan PMII dilaksanakan oleh PB PMII pada tanggal 26-29 September 2003 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

P. Periode 2005-2007

Kongres XV PMII di Bogor Jawa Barat 2005:

Ketua Umum PMII : Herry Haryanto Azumi

Sekretaris Jenderal : Radli Kaelani

Ketua KOPRI : Ai“ Maryati Sholihah

Sekretaris KOPRI : -

Q. Periode 2007-2010

Kongres XVI di Batam Maret 2008:

Ketua Umum PMII : Rodli Kaelani

Sekretaris Jenderal : Zaini Sofari

Ketua KOPRI : Eem Marhamah

Sekretaris KOPRI : Suriyanti R.

R. Periode 2010-2013

Kongres XVII di Banjar Baru Kalsel:

Ketua Umum PMII : Addien Jauharudin

Sekretaris Jenderal : Jabidi Ritonga

Ketua KOPRI : Irma Muthoharoh

Sekretaris KOPRI : Herwanita

Ketua PJS KOPRI : Endang Istianti

S. Periode 2014 – 2016

Kongres XVIII di Jambi:

Ketua umum : Aminuddin Ma'ruf

Sekretaris Jenderal : Abdul Haris Wali

Ketua KOPRI : Ai Rahmayanti

Sekretaris : Desmiati Ishak

C. PERAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki investasi besar dan memiliki nilai strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan di perguruan tinggi merupakan tempat pembentukan peradaban dan budaya suatu bangsa, karena ditopang oleh para SDM yang terdidik dan terlatih. Tradisi yang diciptakan didalam perguruan tinggi selalu mengedepankan nilai-nilai ilmiah dan obejktif. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berfikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Perilaku ilmiah, pedli sosial dan perilaku positif lainnya yang dilandasi oleh nilai dan norma menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat. Prilaku inilah yang seharusnya mampu dikembangkan dan dipertahankan didalam sebuah institusi perguruan tinggi.

Kondisi ini menjadi ruang bagi kader-kader PMII yang berlatar belakang mahasiswa untuk mengapresiasi pengetahuan yang didapat dari perkuliahan/kampus. Bukan lantas menjauh bahkan acuh tak acuh dengan kondisi realitas sekitarnya. Mahasiswa yang merupakan penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam persoalan-persoalan rakyat. Kondisi perguruan tinggi dan kondisi masyarakat pada umumnya seolah-olah terbatasi oleh dinding yang tidak bisa ditembus oleh rakyat biasa. Ketimpangan ini mengakibatkan tidak semua rakyat memperoleh pendidikan tinggi seperti khalayak yang memiliki materi lebih bahkan pas-pasan. Keterdesakan ekonomi mengakibatkan rakyat memilih untuk tidak masuk ke ranah perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perguruan tinggi telah membatasi hubungan sosial antara mahasiswa dengan rakyat.

Dalam konteks kekinian, mayoritas mahasiswa menjadi merasa enggan untuk mengambil dan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Hedonisme, pragmatisme dan instanisme ternyata semakin menggejala dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa terutama kaum perempuan. Sampai mereka kehilangan identitas sebagai kaum intelektual yang dulunya dengan lantang meneriakkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat lemah dan terlemahkan. Kalaupun masih ada, itupun juga dalam jumlah yang sangat minim dibandingkan jumlah keseluruhan. Pergeseran ini jelas disebabkan karena sensitifitas mahasiswa yang selalu tergerus peruabahn zaman. Selain itu pula, rasa nasionalisme semakin terdegradasi dengan seiring sensitifitas sosial yang juga sering menurun karena tingkat individual yang setiap hari kian meninggi.

Kelemahan fundamental yang dapat dianalissi dari realitas pendidikan di Indonesia adalah paradigma industrialisme yang telah masuk ke dalam domain dunia pendidikan kita. Alih-alih sebagai wujud sarana pembanguanan dan pengembangan diri manusia, makna pendidikan telah tereduksi begitu besar hanya sebatas sub sistem dari budaya industrialisme. Dengan tujuan mengkotak-kotakkan pengetahun dengan realita yang mengakibatkan paradigma mahasiswa bahkan masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tidak satu kesatuan.

Hal tersebut kiranya bukanlah hal yang aneh jika fenomena pendidikan Indonesia saat ini dibaca dalam kerangka kebutuhan masyarakat industri, dimana peserta didik adalah manusia yang diproyeksikan sebagai “tenaga kerja profesional di bidangnya” yang tidak lain lain adalah “robot-robot” industri kapitalistik yang mahir dan terampil dalam bekerja sesuai

dengan sistem yang telah ada tidak peduli seberapa tidak manusiawinya kah sistem tersebut. Karena doktrinasi pendidikan yang sangat kuat memaksa mahasiswa untuk berfikir lebih cepat selesai kuliah, bekerja dan menghasilkan uang yang banyak. Yang pada akhirnya menciptakan manusia-manusia yang individualistik.

D. TANTANGAN GLOBAL
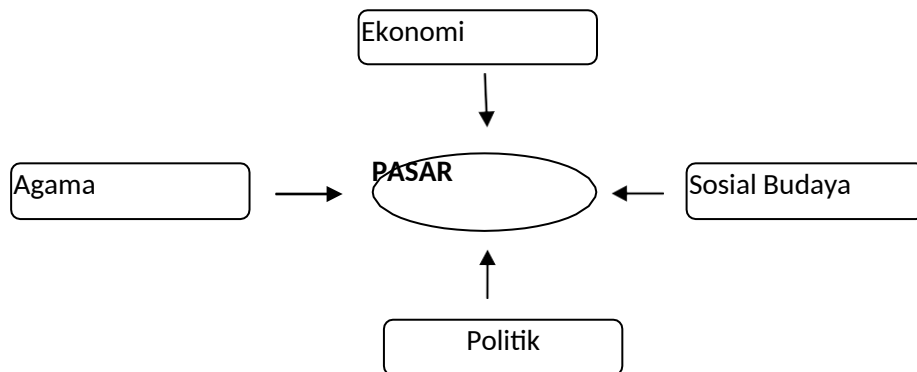
Bagan diatas dapat dirangkai dan menjadi landasan bersama untuk menjawab permasalahan-permasalahan perempuan pada umumnya. Hambatan-hambatan yang membuat perempuan menjadi terbelakang dari segala aspek baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama merupakan balutan dari arus pasar dan permintaan pasar. Tantangan atau hambatan-hambatan inilah yang harus menjadi landasan utama kader-kader putri PMII yang terorganisasikan lewat KOPRI untuk melakukan sebuah gerakan sosial dan mejadi perjuangan bersama.

a. Hambatan ekonomi

Hambatan ekonomi yang paling pokok terhadap kesetaraan perempuan adalah system ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem produksi sosial yang berdiri atas dasar kepemilikan terhadap kapital (modal) baik dalam bentuk tanah, uang, mesin, dll oleh segelintir (minoritas) orang. Kepemilikan inilah yang menghambat kemajuan tenaga produktif (alat kerja/tekhnologi, sasaran kerja/alam/bahan mentah, dan tenaga kerja/laki-laki dan perempuan) dan menghambat pemerataan kemakmuran. Watak yang melekat pada kapitalisme adalah eksploitatif, akumulatif, ekspansif. Itulah sebabnya sistem ini selalu mendahulukan profit (keuntungan) ketimbang kemanusiaan, demi pelipatgandaan kekayaan sedikit orang melalui pemiskinan banyak orang.

Neoliberalisme adalah paham kebijakan yang menjadi jalan keluar dari krisis kapitalisme era 1970-an. Esensinya adalah bagaimana mengusahakan agar perdagangan antar bangsa menjadi lebih mudah. Maksudnya, mengusahakan agar barang-barang, sumber daya, dan perusahaan-perusahaan lebih bebas bergerak, dalam upaya untuk mendapatkan sumber daya yang lebih murah, untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi.

Dampak neoliberalisme terhadap kaum perempuan paling nyata ditunjukkan dalam wujud **feminisasi kemiskinan**. Feminisasi kemiskinan menunjukkan bahwa korban kemiskinan paling banyak adalah perempuan. Kapitalisme neoliberal lah penyebab kemiskinan dan feminisasi kemiskinan didunia saat ini. sebagai contoh sederhana dapat kita bandingkan jumlah kekayaan segelintir orang/keluarga/perusahaan terkaya didunia dengan pendapatan rakyat di banya negara-negara miskin.

Seksualitas dan kecantikan, perempuan juga dieksploitasi seksualitasnya, salah satunya melalui stndard kecantikan. Standard kecantikan untuk mengontrol tubuh perempuan, terlebih lagi dipakai sebagai syarat untuk bekerja. Banyak perempuan di PHK hanya karena tubuhnya tidak memenuhi standard kecantikan yang sudah disepakati. Dampak yang paling parah dari mitos kecantikan ini adalah menyebabkan kaum muda hanya memikirkan kecantikannya saja, menyebabkan sakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kaum muda saat ini – khususnya dinegara-negara maju banyak yang menderita penyakit bullimia dan anorexia, yang tertinggi di dunia adalah Amerika Serikat. Pemujaan terhadap berat badan membuat banyak kaum perempuan menyakiti diri mereka dengan melakukan diet ketat hingga membuat mereka phobia terhadap makanan.

b. Hambatan sosial budaya

Hambatan sosial budaya yang paling pokok terhadap kesetaraan perempuan adalah patriakhi. Patriakhi berasal dari bahasa latin, yaitu pater (bapak) dan arche (aturan), sehingga kalau didefinisikan secara harfiah menjadi aturan ayah. Kaum feminis mencoba untuk memberikan satu definisi yang bisa menjelaskan secara utuh yaitu, sistem politik dan sosial dimana laki-laki dijadikan sentral dalam setiap pengmbilan kebijakan dan aturan-aturan yang berada dalam masyarakat, yang menyebabkan kaum perempuan hanya dianggap sebagai manusia kelas dua.

Sebab kemuncullannya diperkirakan bersamaan dengan tersingkirnya perempuan dari produksi sosial holtikultura mnejadi pertanian, pelembagaan kepemilikan pribadi (kelas-kelas dalam masyarakat), keluarga dan negara, pada masa awal peradaban manusia (zaman sejarah) dan berakhirnya masa primitif (zaman prasejarah). Patriakhi berkembang penuh sebagai sebuah konsep tatanan sosial pada feodalisme.

c. Hambatan Politik

Kebijakan anti demokrasi, anti keberagaman, fundamentalisme dan militerisme menghambat perkembangan perempuan karena menutup ruang demokrasi bagi perempuan dan masyarakat. Ruang demokrasi (*democratic space*) merupakan basis bagi setiap individu untuk mengembangkan kapasitas kognitif, kepribadian, pandangan, dan kekuatannya. Ruang demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam untuk membuat kebijakan, mengontrol kebijakan maupun mengkritik kebijakan. Ruang demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu (baik perempuan maupun laki-laki) untuk mendapatkan informasi maupun komunikasi, baik itu yang non politis maupun yang politis.

Dahulu militerisme yang menopang kekuasaan orde baru menutup ruang demokrasi bagi rakyat untuk berpartisipasi. Pada masa awal kekuasaannya orde baru menghancurkan partisipasi perempuan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan, salah satunya Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), rezim orde baru kemudian menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, dharma wanita bagi istri pegawai negeri sipil, dharma pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja disalah satu cabang angkatan bersenjata, dan PKK (Pmbinaan Kesejahteraan Keluarga).

Organisasi perempuan yang ada tersebut hanya dipaaki untuk menyokong kekuasaan politik orde baru dan Golongan Karya (GOLKAR), yang dilemahkan partisipasinya dan dibuat menjadi massa mengambang. Orde baru juga menghancurkan kesempatan perempuan utnuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, bahkan dihancurkan ingatannya pada sejarah perjuangan pembebasan perempuan sebelumnya melalui pembakaran buku-buku, materi-materi barbau kiri maupun pemutarbalikan sejarah. Perempuan dan organisasi perempuan yang ada kehilangan kekuatan intelektualnya, karena dihilangkan kaitannya dengan sejarah masa lalu dan pasokan informasi seluas-

luasnya. Dalam hal itu semua, sebenarnya negara melalui berbagai aparatusnya telah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia kepada kaum perempuan.

Militerisme bahkan melakukan penindasan keji kepada kaum perempuan. Didaerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Timor-Timur, Papua Barat, Tragedi 1965, kerusuhan 1998, kaum perempuan menjadi korban keganasan militer. Banyak perempuan menjadi korban pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan. Militerisme memperlihatkan bahwa negara melakukan kekerasan struktural yang dilegitimasi atas nama Daerah Otonomi Militer (DOM), Daerah Operasi Militer, Status Darurat, dll. Dan negara membiarkan kekerasan ini berlangsung, karena hingga saat ini pelaku-pelaku kekerasan masih melenggang bebas.

Belakangan ini, ditandai oleh bertambahnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa fundamentalis relijius, kemungkinan kaum perempuan Indonesia untuk dapat dengan bebas bergerak dan memiliki hak atas tubuhnya semakin ditutup. Ini semua menunjukkan meningkatnya wujud-wujud penindasan terhadap perempuan dari kebudayaan konservatif dan interpretasi ajaran agama terhadap tubuh perempuan. Tubuh dan seksualitas perempuan dianggap sebagai ukuran moral masyarakat hingga harus dikontrol oleh aturan-aturan yang bersumber pada otoritas kekuasaan dan penilaian laki-laki (Patriakhi).

d. Hambatan Agama

Fasisme Religius adalah istilah baru yang diwacanakan oleh Coen Husein Pontoh. Lebih maju dari definisi radikalisme dan fundamentalisme. Fasisme sendiri adalah sebuah sistem yang dibangun oleh kelompok borjuis kecil dan tengah Eropa untuk menguasai negara. Fasisme juga dikatakan sebagai penguasaan atau kediktatoran penuh reaksioner.

Adapun ciri-ciri dari fasisme religius adalah:

1. Gerakannya mengambil bentuk mobilisasi massa di jalanan; contoh FPI, HTI, dll. (isu-isu yang diusung anti pluralisme, anti demokrasi, anti liberalisme, anti komunisme, dll)
2. Percaya pada keagungan sistem dan nilai-nilai sosial masa lalu; seperti konsep khilafah, kehebatan kepemimpinan masa lalu, dll.

Tindakan fasisme religius sangat merugikan perempuan, dengan claim kebenaran tafsir yang mereka suguhkan, apa yang kemudian dilakukan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contohnya adalah serangan brutal yang dilakukan oleh FPI dan kelompok kanan lainnya terhadap ideologi atau paham yang dianggap sesat (ILGA, Ahmadiyah, Komunisme, dll), penerapan perda dibeberapa wilayah di Indonesia, dengan dalih kemuliaan untuk perempuan, perempuan terbelenggu dalam ruang public dan mengembalikannya ke ranah domestik. Bukan hanya itu, penafsiran mereka yang dianggap sebuah kebenaran tunggal dalam membolehkan poligami dan etika perempuan menjadikan terkurung dalam ruang yang sama sekali juah dari esensi kehidupannya.

Kunci kemenangan pertarungan dengan kelompok kanan radikal/fasisme religius ini tergantung pada dua hal berikut:

1. seberapa mampu gerakan progresif membangun basis massa yang terorganisir dan berkesadaran kritis;
2. Seberapa mampu kaum progresif memenangkan pertarungan di jalan-jalan.

E. REFLEKSI PARADIGMA KOPRI

Paradigma merupakan hal yang sangat vital dalam organsiasi, dan menjadi tolak ukur dalam memandang suatu kondisi atau realita. Bagi PMII, pengertian paradigma dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang menyusun sebuah teori, menyusun sebuh pertanyaan, dan rumusan mengenai suatu masalah. Berkaitan dengan fenomena perempuan dalam konteks nasional serta sinergitas gerakan KOPRI dalam tinjauan sosiologis-historis, perlu ditinaju ulang paradigma kritis transformatif itu sendiri.

Hingga saat ini tantangan global yang lebih kompleks dalam era kontemporer harus disikapi secara komprehensif dalam berbagai tinajuan. Fenomena yang terjadi di internal KOPRI itu sendiri, semakin naik struktur kepengurusan, kader-kader KOPRI semakin kian terkikis. Permasalahannya adalah banyak kader KOPRI itu sendiri yang terjebak oleh kontradiksi ekonomi, yaitu peluang usaha dan karier kader itu sendiri. Tentu saja, fenomena ini bukan terjadi secara alamiah, tetapi lebih dari itu, bagaimana KOPRI mampu menjawab tantangan kontradiksi ekonomi itu sendiri demi kaderisasi KOPRI.

Didalam tatanan global, permasalahan penindasan perempuan yang terdiri dari hegemoni relasi ekonomi dan patriakhi itu sendiri. permasalahan tersebut semakin dimapankan oleh media komunikasi yang mampu merebut ruang gerak grass root, juga hegemoni kapital/modal sehingga merebut kemandirian relasi ekonomi.

Jika dua problematika utama tersebut dimapankan oleh struktur ekonomi dan politik, maka mau tidak mau pembedahan masalah penindasan tersebut dikaji melalui dua pisau analisa yang komprehensif. Ketimpangan yang terjadi dalam gerakan KOPRI itu sendiri adalah terdapat ruang kosong antara pemahaman secara teoritik dan kesadaran secara praktik. Kajian yang dimapankan dalam ruang diskursus tidak mampu menjawab permasalahan jika saja tidak mampu melakukan advokasi hingga ke ruang-ruang marginal/pelosok, terutama dalam merebut kesadaran yang telah direnggut kaum pemodal.

Disisi lain, diaspora gerakan KOPRI diharapkan mampu mengkonsolidasikan diri dengan berbagai gerakan perempuan secara intens. Hingga saat ini, hal terpenting yang bisa meng-counter ruang geografis penindas adalah semangat persatuan dan nasionalisme itu sendiri. hal ini tdak mampu terwujud jika tidak ada konsolidasi secara massif di antara berbagai elemen, baik gerakan mahasiswa, buruh tani, dan gerakan lain yang terkait. Konsolidasi holistik tersebut mampu menciptakan kemandirian gerakan solidaritas dan solidaritas gerakan perempuan. Titik tekan hal ini adalah menciptakan kader-kader petarung yang siap terjun di masyarakat dengan basis kompetensi dan integritas gerakan.

Secara general paradigma KOPRI dapat direfleksikan melalui konsolidasi basis-holisitk. Disatu sisi gerakan KOPRI diprioritaskan ke dalam sinergitas gerakan antara penguatan teoritik dengan advokasi grass root, juga penguatan konsolidasi interkoneksi, baik melalui relasi ekonomi, relasi politik, maupun relasi antar gerakan perempuan.

F. KOPRI SEBAGAI GERAKAN PEREMPUAN YANG "KHAS"

Korps PMII Putri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Qur`an sebagai *khalifatullah fil ardl* dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam, karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMII baik seluruh umat yang ada dibumi ini, baiks ecara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, keberadaan KOPRI diharapkan mampu menjadi salah satu kelompok efektif yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurai persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Semakin banyaknya gerakan-gerakan perempuan saat ini, KOPRI berusaha untuk membuat arah gerakan KOPRI yang "khas". Ada dua landasan yang akan membuat gerakan KOPRI memiliki cirri dan menjadi arah gerak KOPRI yaitu Nilai Kader KOPRI dan Panca Norma KOPRI. Gerakan KOPRI perlu adanya penguatan-penguatan dari basis atau kader-kader PMII.

Pada kongres ke XVII di Jambi lahir IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI. Ini berangkat dari hasil analisa bahwa penguatan basis ideologi yang lemah, merupakan faktor utama yang membuat kader perempuan PMII tidak bertahan lama didalam organisasi. Ini menegaskan kurangnya penguatan ideologisasi baik landasan dan asupan-asupan gizi intelektual. Ketika sudah menemukan dasar-dasar ideologi, maka akan mempermudah fungsionaris kader dan organizer KOPRI untuk menentukan berbagai langkah gerak serta kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektif gender yang tetap memegang nilai-nilai dasar Islam Ahlusunnah wal Jama‟ah, karena dari nilai-nlai ini telah melahirkan berbagai pandangan dan kemudian dipakai untuk menajamkan analisa untuk berbagai persoalan yang dialami perempuan.

Penguatan basis gerakan, paradigma gerakan KOPRI harus dipertajam lewat penggalian/pengkajian.eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan cara pandang dan cara lihat organisasi terhadap persoalan yang dihadapi. Aswaja merupakan salah satu metode berfikir yang dianggap masih penting dalam melakukan pembacaan persoalan, khususnya persoalan kesetaraan gender yang menjadi fokus kecenderungan KOPRI.

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai wujud bentuk peruabhan dalam wacana-wacana baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal dan eksternal KOPRI. Dan gerakan KOPRI akan lebih massif dan terorganisir baik ketika arah gerak dan tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Dua gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten dengan gerakan dan tujuan PMII. Disamping sebagai kader KOPRI (karena jati dirinya adalah perempuan) yang dapat bergerak pada ranah issue-issue perempuan, disamping yang lain sebagai kader PMII secara mutlak dan senantiasa dapat

bergerak pada isu-isu gerakan sosial lainnya. Jadi pada dasarnya KOPRI harus mampu menerobos pembagian kerja secara gender dengan merumuskan “dua strategi gerakan”:

1. Gerakan politik, out put yang akan dicapai dalam proses gerakan politik adalah penguasaan leading sector oleh kader-kader perempuan PMII.
2. Gerakan sosial, out put yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial adalah advokasi kepada masyarakat baik advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada perempuan dan advokasi ke basis massa (include terhadap sektor buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, dll)

G. NARASI GERAKAN KORPS PMII PUTERI (KOPRI)

Gerakan massif membutuhkan penguatana internal, menurut Saskia Eleonora Wieringa defenisis yang komprehensif tentang gerakan perempuan sangat sukar, karena gerakan perempuan tidak pernah bicara dalam satu bahasa. Tetapi ia memberikan masukan bahwa gerakan perempuan dapat dilihat sebgaai spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif secara sadar atau tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang berperhatian terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gedner yang dipandang sebagai berjalinan dengan penindasan lainnya misalnya yang didasarkan atas prefensi kelas, ras, etnis, umur dan seks.

Organisasi adalah sekumpulan individu yang mengorganisir diri bersama untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama pula. Organisasi memungkinkan sekelompok individu (masyarakat) dapat mencapai hasil yang sebelumnya tidak bisa dicapai jika dilakukan oleh individu secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, organisasi merupakan satu unit yang terkoordinir yang diperlukan sebagai wadah dan alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dari sebuah gerakan yang akan dilakukan.

Organisasi menjadi cukup strategis, karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin. Dan semua elemen-elemen organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan organisasi sebagai media gerakan, kitapun harus menatanya sebagai organisasi gerakan.

Berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan berakar pada adanya cara berfikir dan bertindak yang merendahkan martabat dan kemanusiaan kaum perempuan.

Oleh karena itu, harus ada perubahan cara berfikir dan bertindak bersama secara sadar dan terorganisir untuk menegakkan kembali martabat dan kemanusiaan tersebut melalui proses penyadaran pemahaman gerakan yang berlandaskan *ahlussunnah wal jama"ah* dan berwawasan perspektif gender dengan mendorong gerakan kesetaraan dan kesadaran gender di tingkatan mahasiswa dan masyarakat. Dengan meminjam teori Jurgen Hubermas tentang "public sperare", maka kader putri PMII didorong untuk mencapai pemenangan war of position dengan tetap menghargai harmoni kultur. Olehnya akan tercipta kader perempuan yang memiliki kesadaran kritis, pola kaderisasi yang menciptakan identitas dan citra diri kader yang cerdas, visioner dan berakhlakul karimah, memiliki karakter yang kuat serta pijakan gerakan pada aswaja dan kearifan lokal. Penguatana ideologi ini harus semakin diperkuat dalam setiap kaderisasi dan menjadi ruh gerakan.

KOPRI
MUSUH BERSAMA
PATRIAKHI
KAPITALISME
FASISME RELIGIUS
IMPERIALISME
ORIENTASI PERJUANGAN KOPRI
TEKS TRANSENDENTAL
TEKS HISTORIS
ASWAJA
NDP
PKT
ORIENTASI PERJUANGAN
PERSONAL
Kader Ulul Albab:
- Dzikir (Spirit Kerohanian), Fikr (Spirit Intelektual), dan Amal Sholeh (Spirit Aktivis Gerakan)
- Spiritualitas, Intelektualitas, dan Profesionalitas.
SOSIAL BERKEADILAN GENDER
Cita-cita Kemerdekaan
Keadilan Politik:
Demokrasi Nasional
Keadilan Ekonomi:
Kerakyatan
Keadilan Sosial:
Recognition & redistribution

H. KOPRI DAN PMII: BERBARENG BERGERAK

Kondisi internal dan eksternal KOPRI menjadi probelm yang perlu diselesaikan dengan bijaksana. Kondisi internal, kenyataan minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan dijenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader putri untuk bergelut dengan wilayah pemikiran, minimnya kader putri yang terlibat dengan akses-akses jaringan diluar organisasi KOPRI, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi dan kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kenyataan ini sebagai salah satu latar belakang yang dihadapi KOPRI.

Masih dalam konteks internal, salah satu yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan adalah munculnya kader-kader putri PMII sebagai tokoh yang dapat mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional bahkan internasinal. Kader-kader putri yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus mampu dibangun untuk mempercepat perubahan sosial yang lebih baik.

Dalam faktor eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang intens dengan persoalan-persoalan perempuan. Ini menjadi tantangan bagi KOPRI untuk terus melakukan penguatan organisasi dan individu kader untuk dapat terjun langsung melakukan perubahan dalam konteks sosial. Bukan hanya itu, KOPRI pun akan dihadapkan dengan lembaga lain yang juga konsen dengan persoalan-persoalan perempuan (Derpartemen Pemerintahana, LSM, dll.) KOPRI harus mampu mengkonsolidasikan diri bahkan me-*leading* baik gagasan maupun gerakan sampai ke *Grass root*.

Problem diatas, harus menjadi prioritas utama dalam proses pengkaderan KOPRI yang baik. Dan KOPRI membutuhkan legitimasi struktur, pengembangan dan pembinaan organisasi, dukungan moral politik, intelektual dari PMII sebagai oranisasi induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan Grand Design yang telah di rancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara, dan dunia.

I. PENUTUP

Narasi yang cukup panjang di atas, kami maksudkan sebagai ikhtiar kami dalam membaca kenyataan realita Indonesia, dimana kita semua, PMII dan KOPRI hidup dan

berkembang didalamnya. Dalam perjalanannya KOPRI mengalami pasang surut, sejarah mencatat KOPRI lahir kemudian dibekukan hingga lahir kembali dengan proses yang panjang. Diluar polemik bahwa KOPRI harus otonom dan semi otonom, hal yang paling mendasar untuk dibenahi adalah sistem pengkaderan dan gerakan KOPRI. Dalam hal pengkaderan mengembangkan dan penguatan kapasitas intelektual kader putri harus dimaksimalkan dengan tahapan pendidikan berjenjang. Pematangan kapasitas intelektual harus ditekankan dan harus ada kesadaran bagi KOPRI untuk membangun pola pikir dan pola komunikasi yang baik.

Pada kesempatan kali ini kami belum secara maksimal merumuskan modul kaderisasi KOPRI, harapannya semoga dapat disusun kembali di lain kesempatan oleh kami atau generasi KOPRI berikutnya yang mampu menangkap dan membahasakan kenyataan secara lebih jernih dan lugas.

BAB II
SISITEM KADERISASI KOPRI

Bukan perkara mudah bagi kita membahas dan menjawab sistem akderisasi PMII. Masih menjadi isapan jempol dan mengkhayal ke-idean kaderisasi PMII akan berjalan mulus, butuh waktu yang panjang dalam proses pengkaderan yang harus dilakukan oleh organisasi PMII.

Bergitu juga dengan Korps PMII Putri (KOPRI) yang masih berada didalam naungan PMII memiliki tanggung jawab tersendiri untuk merumuskan sistem kaderisasi. Bukan tanpa alasan ketika KOPRI turut andil dalam perumusan kaderisasi PMII khususnya KOPRI. Ada banyak faktor dan pembacaan ulang tentang makna kaderisasi sesungguhnya, membuat kader-kader perempuan PMII terdorong menginisiatif diri untuk merumuskan sistem kaderisasi tersendiri.

Selain itu, KOPRI sebagai badan semi otonom PMII secara idealnya KOPRI mampu menyusun dan mengelola sistem kaderisasi secara mandiri tanpa meninggalkan konsep pengkaderan PMII yang sudah ada.

A. Pandangan Umum Pengkaderan

Sejak berdiri secara 25 November 1967 di Semarang, KOPRI telah mengalami berbagai fase perubahan karena proses dialektika wacana dan pemikiran tentang feminisme dan gender yang terjadi di tubuh KOPRI khususnya dan PMII pada umumnya. Proses dialektika itu diantaranya ditandai dengan dibubarkannya KOPRI di Kongres Medan 2000 dan kemudian didirikan kembali diforum POKJANAS di Jakarta 2003. Dalam prosesnya, lahir perbedaan-perbedaan gagasan, baik dalam penafsiran tentang gender dan feminism sebagai sebuah pengetahuan maupun dalam hal pengambilan kebijakan organisasi untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kader-kader perempuan PMII khususnya dan perempuan masyarakat luas.

Dalam proses perkembangan, Korps PMII Putri (KOPRI) sebagai wadah kader perempuan PMII meyakini perannya sebagai *khalifatullah fil ard* dan keberadaannya akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus bisa dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMII baik laki-laki maupun perempuan tetapi juga bagi seluruh umat yang ada dimuka bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyempurnaan struktur KOPRI sebagai badan semi otonom PMII yang merupakan ruang pengembangan dan pembinaan masalah perempuan seyogyanya dimaksimalkan untuk memperkuat kader perempuan PMII dalam nalar intelektual dan ideologi organisasi, yaitu aswaja perspektif perempuan. Ruang ini merupakan strategi memaksimalkan gerakan PMII. Karena gerakan-gerakan perempuan yang massif adalah juga bagian yangberpengaruh besar terhadap bentuk perubahan dan perannya di organisasi (internal), negara, dan agama. Telah dirumusan misi penting gerakan perempuan PMII yang terumus dalam institusi KOPRI, yaitu:

Ideologisasi

Struktur Kolektif

Membentuk Masyarakat yang Berkeadilan Gender
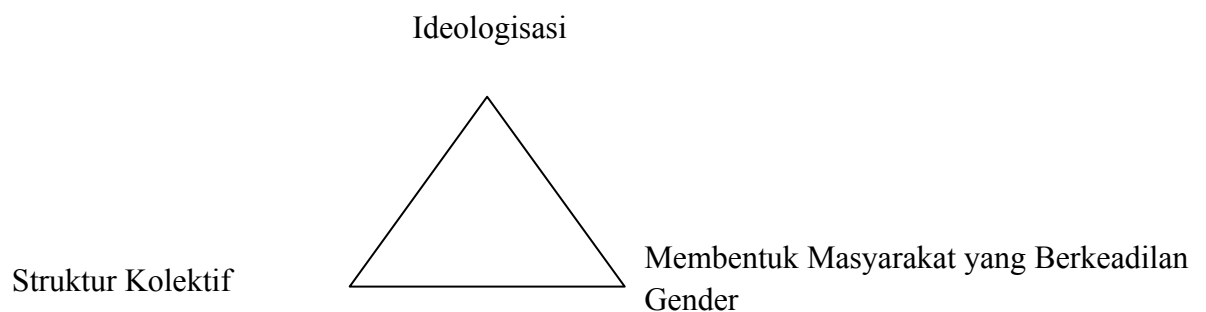
Untuk itu, penguatan materi tentang gender perspektif, menganalisa, pembacaan kritis, dan memiliki sensitifitas gender dalam menyikapi berbagai persoalan gender dan fenomenannya, produk-produk kebijakan pemerintah daerah, dan KOPRI harus mampu memberikan alternatif-alternatif gagasan yang lebih mengakar dan relevan dengan kepentingan masyarakat khususnya perempuan. Pembacaan yang kritis adalah pembacaan yang multidimensi dan berkelanjutan.

B. Tiga Pilar Pengkaderan

Peningkatan kualitas kader dan pengkaderan KOPRI haruslah sesuai dengan pengkaderan yang sudah dilakukan di PMII sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum, khusus dan skills. Umum itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang diluar dari nilai-nilai ke-PMII-an dan ke-Islam-an, khusus yang bermuatan prinsip dasar PMII seperti NU, NDP dan ASWAJa, sedangkan katerkaitan skill adalah bagaimana kita menciptakan kader 10-15 tahun ke depan akan dibawa kemana kader sesuai dengan minat, bakat serta potensi kader.

Ketiga pilar ini harus menjadi spirit bergeraknya kader-kader perempuan PMII dalam wujud gerakan yang otentik. Yang tak akan pernah lepas dari ketiga pilar diatas, dalam perwujudan dan menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni: sebagai mahasiswa, memiliki semangat juang dan gerakan, terampil dan bertanggung jawab akan intelektualitasnya. Keyakinan, pemahaman, pelaksanaan, dan penghayatannya atas ajaran Islam, dan pengetahuan, wawasan, dan pembelaannya terhadap negara bangsa Indonesia.

BAB III
MATERI-MATERI PENGKADERAN

Tanpa menghilangkan pola kaderisasi yang sudah ada di PMII, perlu adanya penguatan institusi Korps PMII Putri (KOPRI) sebagai organsasi yang berbadan semi otonom. Sama halnya dengan PMII, adanya kaderisasi formal, informal, dan non-formal. Dalam hal ini KOPRI berusaha mengkolaborasikan pola kaderisasi yang ada di PMII dengan kebutuhan kader-kader perempuan PMII yang ada di KOPRI.

A. Tentang Modul

Modul ini merupakan hasil dari aksi dan refleksi kader-kader perempuan PMII yang tergabung dalam Korps PMII Putri (KOPRI) sebagai acuan untuk melakukan kaderisasi non-formal di PMII, dan sebagai wujud kesadaran koletif akan pentingnya pembenahan kaderisasi KOPRI.

- Modul ini secara khusus ditujukan kepada seluruh PR, PK, PC dan PKC KOPRI se-Nasional sebagai acuan untuk melaksanakan kaderisasi ditingkat basis masing-masing sesuai dengan konteks dan kebutuhan KOPRI tiap-tiap daerah.
- Modul ini berisi tentang outline-outline materi untuk peserta dan session plan untuk fasilitator.
- Outline-outline materi sebagai bahan bacaan peserta untuk lebih memahami isi materi.
- Session plan merupakan rencana panduan untuk fasilitator disetiap sessi.

B. Materi-Materi Menurut Tiga Pilar Dasar

Jenjang	Materi Khusus	Materi Umum	Materi Keahlian
SIG Sekolah Islam dan	a. Konsep Dasar Islam b. Gender Perspektif Al-quran c. Gender Perspekif Hadist	a. Identifikasi Masalah (Perkenalan,Identifikasi , Harapan dan Kekhawatiran terkait	

Gender	d. Fiqh Perspektif Perempuan	perempuan b. Hukum Islam di Indonesia	
SKK Sekolah Kader KOPRI	a. Ke-KOPRI -an b. Sinergi dan Relasi KOPRI dengan Gerakan Multisektor	a. Analisis Struktur Patriarki b. Konsep Gender, Seks dan Seksualitas c. Teori-Teori social gerakan perempuan (Feminisme)	a. Ansos Perspektif Feminis b. Advokasi Kebijakan Publik c. Teknik Lobiying dan Penguatan Jejaring
SKKN Sekolah Kader KOPRI Nasional	a. NU- logi b. KOPRI Perspektif Ideologi Politik dan Organisasi c. Arah Gerakan Perempuan Nahdliyin	a. Geo Strategi dan Geo Politik Gerakan Perempuan b. Perempuan dan Ruang Strategis Negara c. Kedaulatan Pangan Berbasis Gender d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Persfektip Ekofeminisme	a.Community Organizing b. Manajemen Pelatihan c. teknik Fasilitasi

BAB IV
KURIKULUM PENGKADERAN KOPRI

Pendahuluan

A. Tentang Kaderisasi KOPRI

Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan berfikir dan berekspresi. Tetapi kebebasan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh manusia. Kemiskinan merajalela, perang antar etnik, kerusuhan antar agama, kelaparan, pengangguran, dan masih banyak lagi problem yang dihadapi negeri ini. Dan yang lebih merasakan problem ini adalah mayoritas kaum perempuan. Perempuan menjadi objek terbesar yang didiskriminasi, marjinalisasi, stereotype, menjadi sasaran kekerasan, menjadi sasaran alat pemuas, beban ganda dalam urusan domestik merupakan takdir perempuan. Dalam hal ini perempuan belum merdeka sebagai manusia yang utuh.

Berangkat dari nilai tauhid yang ajarannya menggelorakan semangat *rahmatan lil „alamin* membawa sistem berfikir yang rasional dan objektif demi keadilan kemanusiaan. Kehadiran agama sebenarnya untuk menyelesaikan problem kemanusiaan. Menyuarakan keadilan (*al-„adl*), kebebasan (*al-hurriyah*), kesetaraan (*al-musawwah*), dan memanusiaka manusia (*mu"asyarah bi al-Ma"ruf*).

Untuk itu Korp PMII Putri (KOPRI) sebagai wadah kader perempuan PMII menyadari perannya sebagai *khalifatullah fil al-ardl* dan keberadaannya akan menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus mampu mengambil posisi dalam problem kaum perempuan saat ini.

Untuk itu penguatan intelektual merupakan tugas bersama sebagai organisasi kader, tentunya untuk membangun kapasitas kader serta mendidik individu untuk memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi kepada organisasi demi terwujudnya kesejahteraan Indonesia. Sementara organisasi bagi seorang kader adalah ruang pendidikan, ruang belajar, dan ruang berlatih agar masing-masing individu telah siap ketika menghadapi kehidupan di masyarakat.

KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang merupakan organisasi kader, secara otomatis mempunyai tanggung jawab dalam mencetak kader-kader yang berkualitas. Dan ini

terkait intelektualitas, kemampuan dan kreatifitas yang harus dimiliki kader-kader perempuan PMII, sesuai yang dicita-citakan organisasi.

Kaderisasi KOPRI ini terdiri dari Sekolah Islam Gender (SIG), Sekolah Kader KOPRI (SKK), Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN). Sekolah Islam Gender lebih kepada salah satu bentuk kreatifitas anggota untuk terus melakukan penguatan intelektual dan wawasan anggota PMII. Sekolah ini dilakukan dengan konsep dari, oleh dan untuk anggota PMII baik laki-laki maupun perempuan dan metode belajar yang partisipatif agar lebih menyenangkan dan sharing pengetahuan. Disini suasana yang digunakan benar-benar suasana kelas disekolah tetapi dengan metode yang berbeda, sekolah ini tidak hanya dirasakan oleh anggota perempuan PMII tetapi juga dapat dirasakan dan diikuti oleh anggota laki-laki, karena bentuk penyadaran harus segera dilaksanakan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki. Program Sekolah Islam Gender dalam rangka memberikan penyadaran bahwa pemahaman Islam dan Gender sangat dibutuhkan oleh anggota PMII agar peka dan sensitif gender terhadap permasalahan perempuan. Sekolah Islam dan Gender dilaksanakan untuk anggota PMII yang telah mengikuti MAPABA dan resmi menjadi anggota. Dan dilanjutkan dengan Sekolah Kader KOPRI (SKK) merupakan pendidikan lanjutan bagi kader yang telah mengikuti Pendidikan Kader Dasar (PKD) dan telah mengikuti Sekolah Islam Gender. Selanjutnya Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) dilaksanakan untuk akder yang telah mengikuti Pendidikan Kader Lanjutan (PKL) dan SKK. Untuk SKK dan SKKN lebih difokuskan kepada kader-kader perempuan PMII.

Pendidikan berjenjang ini dimaksudkan agar pemahaman anggota/kader dan penguatan intelektual secara utuh dan tersistematiskan. Tidak terpotong-potong dan menjadi satu kesatuan pemahaman yang real ke masyarakat umumnya dan kader-kader PMII secara keseluruhan.

Pada akhirnya upaya kecil ini bertujuan agar sebagian kecil kaum perempuan yang sadar akan penindasan saat ini, tidak asyik dengan dunianya sendiri, wacana-wacananya dengan ide-idenya yang cemerlang melainkan juga bertanggung jawab kepada ilmunya sesuai dengan tujuan PMII, dan dapat menjawab keresahan-keresahan yang terjadi pada mayoritas perempuan lainnya

B. Tujuan

- Menciptakan kader yang Ulul Albab

- Penguatan intelektual dan kemandirian kader
- Mencetak kader yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi
- Membentuk kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan
- Membentuk kader pelopor, pembaharu dan kreator.

C. Model Pendekatan

Sekolah Islam Gender, Sekolah Kader KOPRI, dan Sekolah Kader KOPRI Nasional ini diselenggarakan bagi mahasiswa yang telah menjadi anggota PMII dan telah mengikuti pendidikan formal yaitu MAPABA. Untuk itu secara umum ini merupakan pendidikan nonformal di PMII dalam kaderisasi KOPRI ini menggunakan pendekatan partisipatoris yang menekankan keaktifan peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan dan gagasannya sesuai materi yang diberikan.

Adapun setiap materi/sessi menekankan beberapa aspek yang diperlukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman pengetahuan, yaitu:

a. *Problematik*, permulaan seriap pembelajaran diawali dengan penyajian persoalan yang dibahas atau dipecahkan. Oleh karena itu, dengan adanya problem semua yang dihadapi merupakan tantangan yang harus diselesaikan.
b. *Discovery* atau *inquiry*, peserta didorong untuk dapat mengkaji dan menemukan hal-hal baru. Langkah ini mempunyai dua arah tujuan, yaitu pertama: mendorong peserta untuk lebih kreatif menyikapi sebuah permasalahan, dan kedua memberikan kesadaran kepada peserta bahwa masih banyak sumber lain yang dapat dikaji dan penemuan-penemuan baru.
c. *Sharing*, yaitu berbagi pengalaman antar individu dalam memecahkan masalah.

D. Jenjang Kaderisasi KOPRI

1. Kurikulum Sekolah Islam dan Gender (SIG)

a. Ketentuan Umum Sekolah Islam dan Gender

❖ Pengertian

Sekolah Islam Gender adalah fase orientasi kepada anggota-anggota perempuan dan laki-laki PMII setelah mengikuti kaderisasi formal yaitu MAPABA. Dan dalam rangka penguatan intelektual anggota PMII terhadap Islam ramah perempuan, isu-isu gender dan sensitifitas gender di Masyarakat.

❖ Tujuan

Secara umum, anggota diharapkan menjadi anggota yang berkualitas MUTAKID, yakni anggota yang memiliki loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi dan peka terhadap bahwa Islam ramah perempuan, isu-isu gender dan sensitifitas gender dilingkungan sekitarnya.

Secara khusus, setelah mengikuti Sekolah Islam Gender, anggota diharapkan:

- Memiliki keyakinan bahwa PMII dan KOPRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang tepat untuk pengembangan diri mahasiswa Islam.
- Memiliki keyakinan bahwa PMII dan KOPRI adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang paling tepat untuk memperjuangkan idealisme dan memperjuangkan kaum mustad"afin tanpa memandang jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan.
- Mengikuti Ahlussunnah Wal Jama"ah (ASWAJA) sebagai dasar prinsip pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Islam di Indonesia.

❖ Penyelenggara

Sekolah Islam Gender diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat dan telah mengikuti Sekolah Islam Gender. Penyelenggara Sekolah Islam Gender melalui pengurus KOPRI mengkoordinasikan kepada Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat secara umum dan keseluruhan.

❖ Peserta

Peserta Sekolah Islam Gender adalah anggota baru yang telah mengikuti dan dibai‟at menjadi anggota PMII.

b. Unsur Pelaksana Sekolah Islam Gender

Unsur pelaksana Sekolah Islam Gender adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Sekolah Islam Gender. Sebagian unsur pelaksana Sekolah Islam Gender ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsur pelaksana Sekolah Islam Gender adalah sebagai berikut:

❖ Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara Sekolah Islam Gender untuk melaksanakan Sekolah Islam Gender. Dan panitia terdiri dari pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat serta telah mengikuti Sekolah Islam Gender dengan tanda bukti berupa setifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Comitee* (SC) dan *Organizing Comitee* (OC). Secara detail susunan kepanitian dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan Sekolah Islam Gender. Tugas panitia Sekolah Islam Gender adalah:

a. Merancang konsep dan tekhnis pelaksanaan Sekolah Islam Gender
b. Bersama penyelenggara, menetapkan Narasumber, Fasilitator, dan Moderator
c. Mempersiapkan sertifikat untuk peserta, Narasumber, Fasilitator, dan Moderator
d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta Sekolah Islam Gender serta mengkoordinasikannya dengan bidang kaderisasi Rayon/Komisariat
e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas Sekolah Islam Gender
f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggung jawabkannya kepada penyelenggara Sekolah Islam Gender.

❖ Narasumber

Narasumber Sekolah Islam Gender adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan Sekolah Islam

Gender dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam Sekolah Islam Gender mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti MAPABA dan Sekolah Islam Gender, dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran Pengurus Cabang.
b. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi.
c. Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

❖ Fasilitator

Fasilitator Sekolah Islam Gender adalah kader yang minimal telah mengikuti PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi Sekolah Islam Gender. Fasilitator Sekolah Islam Gender berjumlah maksimal 2 orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas fasilitator dalam Sekolah Islam Gender adalah sebagai berikut:

a. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan Sekolah Islam Gender, dll)
b. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari Sekolah Islam Gender diawal kegiatan.
c. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi Sekolah Islam Gender diakhir kegiatan.
d. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi Sekolah Islam Gender.
e. Mengantarkan dan mengakhiri sessi sebelum dan setelah materi.

❖ Notulen

Notulen Sekolah Islam Gender adalah anggota atau kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:

a. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi Sekolah Islam Gender.
b. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca.
c. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.

❖ Petugas Forum

Petugas forum adalah anggota atau kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh menyangkut pelaksanaan Sekolah Islam Gender. Petugas forum berjumlah maksimal tiga orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

c. Kurikulum Sekolah Islam Gender

NO	Materi Sekolah Islam dan Gender	Status	Waktu
1.	**Konsep Dasar Islam** a. Tujuan Mengenal dan memahami istilah dasar Islam sertakonsep tauhid dalam islam sebagai basis transformasi menuju keadilan social. b. Pokok bahasan (1) Makna Islam (2) Misi Dasar (3) Peran dasar manusia di muka bumi (4) Prinsip keadilan gender dalam konsep tauhid dan kehidupan	Wajib	150 Menit
2.	**Gender Perspektif Al-Quran** a. Tujuan Memahami konteks budaya saat pewahyuan AL-Quran dan kaitannya dengan risalah kemanusiaan Islam dalam pewahyuan	Wajib	150 Menit

	terutama misi pembebasan perempuan b. Pokok bahasan (1) Prinsip keadilan gender dalam al-Quran (2) Isu-isu bias gender dalam tafsir al-Quran		
3.	**Gender Perspektif Hadist** a. Tujuan Peserta mengetahui posisi dan kualifikasi hadits, serta konsekuensinya sebagai dasar hukum b. Pokok bahasan (1) Posisi dan kualifikasi hadits (shahih, hasan, dlaif) (2) Kaidah periwayatan hadits dan katerlibatan perempuan dalam periwayatan. (3) Pemaknaan ulang terhadap teks-teks hadits yang bias gender, seperti penciptaan manusia, mayoritas perempuan penghuni neraka, perempuan dapat membatalkan sholat, perempuan membawa sial, kurang akal dan kurang agama, kepemimpinan politik, pelaknatan akibat penolakan hubungan seksual, totalitas ketaatan (sujud) terhadap suami, perwalian, perempuan yang minta cerai, mahram , dan lain-lain	Wajib	150 Menit
4.	**Fiqh Perspektif Perempuan** a. Tujuan Peserta mengenal istilah –istilah dasar dalam fiqh, dan prinsip karakteristik dasar fiqh, dan kaitannya dengan konteks social yang melatari b. Pokok bahasan (1) Sosio- historis perkembangan fiqh madzhab. (2) Ulama perempuan dalam madzhab fiqh. (3) Isu-isu bias gender dalam fiqh madzhab.	Wajib	150 Menit

	(4) Perspektif perempuan dalam tradisi fiqh. (5) Pemikiran fiqih kontemporer yang adil gender		
5.	**Identifikasi Masalah** a. Tujuan Peserta mampu mengurai akar permasalahan yang dihadapi perempuan serta dapat menemukan solusi terutama mengenai perdebatan soal agama. b. Pokok bahasan (1) Perkenalan (2) Identifikasi (3) Harapan (4) Kekhawatiran	Wajib	150 menit
6.	**Hukum Islam Indonesia** a. Tujuan Peserta dapat memahami sejarah dan corak pemahaman Islam yang masuk ke Indonesia serta pengaruh budaya pembawa Islam terhadap corak keislamanan di Indonesia dan memahami pergulatan antara hukum islam dengan politik di Indonesia terutama yang mendiskriminasikan perempuan. b. Pokok Bahasan (1) Sejarah masuknya Islam di indoenesia dan corak pemikiran dominan yang dibawa. (2) Hubungan hukum islam dan kebudayaan di Indonesia : proses pembentukan dan implementasi (3) Hukum Islam dan Politik : studi kasus Kompilasi Hukum Islam (KHI) (4) Analisa Isi Hukum Islam (Positif) di Indonesia : • UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Wajib	150 Menit

	• Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam		

d. Follow Up Sekolah Islam Gender

Follow up atau tindak lanjut SIG adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota perempuan PMII yang telah melaksanakan SIG. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman anggota baru PMII atas materi-materi MAPABA dan SIG. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan keterampilan khusus anggota baru

2. Penyelenggara

   Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerja sama dengan KOPRI dan peserta yang dibentuk dalam sessi general review dan RTL SIG.

3. Kegiatan Follow Up

   Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan keterampilan dasar berorganisasi dan keterampilan tambahan sehingga diharapkan anggota benar-benar memiliki kemampuan lebih dibanding mahasiswa non-PMII. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII.

Kegiatan follow up sebagai berikut:

a. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

Leadership skill merupakan salah satu elemen kunci yang harus dikuasai oleh semua kader perempuan PMII. Dan memahami hakikat kepemimpinan, bukan hanya struktur atau jabatan. Tetapi dirinya sendiri akan menjadi pemimpin bagi masyarakat.

b. Public Speaking

Pelatihan public speaking ini dimaksudkan agar anggota mampu menguasai dan mengelola kata dalam ruang yang lebih besar.Mengatur tutur kata dengan kesopanan, ramah tamah, dan bermakna.

c. Pelatihan PO PPATA

Pelatihan ini diharapkan peserta mampu membaca dan menelaah terkait pola relasi KOPRI dan PMII kemudian diperjelas dalam Peraturan Organisasi PMII.Di dalam modul ini pula dijelaskan KOPRI sebagai Badan Semi Otonom yang mempunyai legitimasi seperti PMII dalam berbareng bergerak bersama untuk memajukan organisasi.

2. Kurikulum Sekolah Kader Kopri (SKK)

a. Ketentuan Umum Sekolah Kader Kopri (SKK)

❖ Pengertian

Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah fase penanaman nilai-nilai dan misi pergerakan serta pembentukan militansi anggota untuk menjadi kader KOPRI. SKK merupakan fase dalam kaderisasi KOPRI dan diikuti oleh kader perempuan yang telah mengikuti Sekolah Islam Gender bersama pembelajaran 6 bulan dan PKD.

❖ Tujuan

Secara umum Sekolah Kader KOPRI bertujuan membentuk kader MUJAHID yakni kader militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan.

Secara khusus, setelah mengikuti Sekolah Islam Gender anggota diharapkan:

- Siap untuk memberikan diri bagi kepentingan pergerakan

- Memiliki pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan yang mumpuni
- Memiliki kemampuan dan keterampilan berorganisasi.

❖ Penyelenggara

SKK diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang dan telah mengikuti SKK. Penyelenggara SKK melalui pengurus KOPRI mengkoordinasikan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang secara umum dan keseluruhan.

❖ Model Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan secara umum dalam SKK adalah pendekatan partisipatoris yang menekankan keaktifan peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan gagasannya sesuai materi yang diberikan. Menjadi catatan bahwa pendekatan partisipatoris digunakan dengan tetap menjaga konsistensi tujuan SKK dan tujuan materi.

❖ Peserta

Peserta SKK adalah kader perempuan PMII yang telah menyelesaikan Sekolah Islam Gender dan telah mengikuti pendidikan formal PKD.

b. Unsur Pelaksana SKK

Unsur pelaksana SKK adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SKK. Sebagian unsur pelaksana SKK ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsur pelaksana SKK adalah sebagai berikut:

❖ Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara Sekolah Islam Gender untuk melaksanakan Sekolah Islam Gender. Dan panitia terdiri dari pengurus atau anggota yang telah mengikuti Sekolah Islam Gender dengan tanda bukti berupa sertifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Comittee (SC) dan Organizing Comittee (OC). Secara detail susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan SKK. Tugas panitia SKK adalah:

a. Merancang konsep dan tekhnis pelaksanaan SKK
b. Bersama penyelenggara, menetapkan narasumber, fasilitator dan moderator
c. Mempersiapkan sertifikat untuk peserta, narasumber, fasilitator dan moderator

d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta SKK serta mengkoordinasikannya dengan bidang pengkaderan Cabang atau Koordinator Cabang
e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas SKK
f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggung jawabkannya kepada penyelenggara SKK

❖ Narasumber

Narasumber SKK adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SKK dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam SKK mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kader PMII atau KOPRI ysng minimal telah mengikuti PKD dan SKK, dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran Pengurus Koordinator Cabang.
b. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni)dan dipandang memiliki kompetensi.
c. Tokoh masyrakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi.
d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

❖ Pemandu Ahli

Pemandu ahli adalah kader atau orang yang ditunjuk untuk mendampingi peserta SKK secara khusus dalam sessi studi banding keprofesian. Pemandu ahli sebaiknya telah memiliki pengalaman dan memahami seluk beluk dunia profesi yang akan dikunjungi.

Tugas-tugas pemandu ahli:

a. Mendampingi peserta melakukan studi banding
b. Menjelaskan kepada peserta seluk-beluk keprofesian

❖ Fasilitator

Kader yang minimal telah mengikuti SKK, dinilai memiliki pengetahun cukup atas materi-materi SKK. Fasilitator SKK maksimal berjumlah dua orang. Mereka

bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas fasilitator dalam SKK adalah sebagai berikut:

a. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK, dll)
b. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK diawal kegiatan.
c. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK diakhir kegiatan.
d. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK.
e. Mengantarkan dan mengakhiri sessi sebelum dan setelah materi.

❖ Notulen

Notulen SKK adalah anggota atau kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:

a. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi SKK.
b. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca.
c. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.

❖ Petugas Forum

Petugas forum adalah anggota atau kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh mneyangkut pelaksanaan SKK. Petugas forum berjumlah maksimal 3 orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

c. Kurikulum Sekolah Kader KOPRI (SKK)

<table>
<tr><th>NO</th><th>Materi Sekolah Kader KOPRI (SKK)</th><th>Status</th><th>Waktu</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ke-KOPRI-an

a.Tujuan
Peserta mengenal KOPRI dan memahami apa yang menjadi aturan oragnisasi di KOPRI.

b.Pokok bahasan
1. Sejarah, asas, dan tujuan, serta paradigma KOPRI.
2. Aswaja sebagai Ideologi Politik Organisasi KOPRI.
3. Pola hubungan KOPRI-PMII.
4. Mekanisme pengambilan
Keputusan.
5. Struktur KOPRI.
6. Syarat-syarat Pembentukan PR-PC-PKC-PB KOPRI.
7. Keanggotaan KOPRI.
8. Atribut KOPRI.
9. Sumber Keuangan.
10. Kode Etik KOPRI.</td><td>Wajib</td><td>150
Menit</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sinergi dan Relasi KOPRI dengan Gerakan Multisektor

a. Tujuan
Peserta mampu menjadi pelopor gerakan perempuan yang beraklakhul karimah. Peserta juga menjadi pelopor dan pemersaatu bersama gerakan masyarakat dmi kemaslakhatan umat.

b. Pokok bahasan
1. Peserta mampu membangun sinergi dengan gerakan</td><td>Wajib</td><td>150
Menit</td></tr>
</table>

	masyarakat 2. Peserta mampu menyusun program bersama dengan masyarakat		
3.	**Analisis Struktur Patriarki** a. Tujuan Peserta dapat memebedah siapa sesungguhnya struktur patriarki itu sendiri, dan peserta mampu mengkongkritkan “struktur patriarki”sebagai struktur yang dibentuk oleh sistem kapitalisme, sistem politik yang tidak demokratis b. Pokok bahasan (1) Pemahaman konteks budaya yang berujung pada pelabelan di masyarakat (2) Bentuk ketimpangan sosial yg dihasilkan budaya patriarki	Wajib	150 Menit
4.	**Konsep Gender, Seks dan Seksualitas** a. Tujuan Peserta mengetahui dan memahami pengertian (bahasa dan istilah) seks, seksualitas serta perbedaan dan gender didiskusikan dengan pengalaman dan realita bentuk-bentuk ketertindasan seksualitas yang dialami perempuan b. Pokok bahasan (1) SOGI (seks, orientasi seksual, gender, dan Identitas) (2) Pandangan agama dan budaya	Wajib	150 Menit
5	**Teori-Teori Ilmu Sosial Gerakan Perempuan** a. Tujuan Peserta dapat mengetahui dan memahami sejarah gerakan perempuan dan aliran feminisme yang berkembang sampai	Wajib	150 Menit

	sekarang b. Pokok bahasan (1) Sejarah kemunculan gerakan perempuan (2) Teori feminisme (3) Capaian feminis gelombang pertama (4) Capaian feminis gelombang kedua (5) Arah Gerakan perempuan kontemporer		
6.	**Analisis Sosial Perspektif Feminis** a. Tujuan Peserta memiliki perangkat konseptual untuk memahami kenyataan masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global tentang ketimpangan sosial berdasarkan berdasarkan gender. Dan untuk memahami kerangka dan pola sosial dalam kenyataan masyarakat sebagai pengetahuan dasar bagi mungkinnya sebuah gerakan perempuan yang lebih massive. b. Pokok bahasan (1) Kenyataan sosial sebagai medan gerakan PMII dan KOPRI (2) Prinsip-prinsip dan model analisis sosial	Wajib	150 Menit
7.	**Advokasi Kebijakan Publik** a. Tujuan Peserta memahami proses penyusunan kebijakan dan anggaran, ragam kebijakan dan besaran alokasi anggaran program-program pemerintah. Selanjutnya peserta diharapkan mampu mengambil posisi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang menjadi modal dasar dalam advokasi dan pendampingan masyarakat	Wajib	150 Menit

	b. Pokok bahasan (1) Pengertian advokasi (2) Proses serta mekanisme penyusunan kebijakan dan angaran advokasi dan pendampingan masyarakat sebagai salah satu bentuk strategi pergerakan.		
8.	**Tekhnik Lobbying dan Penguatan Jaringan** a. Tujuan Peserta dapat mengerti dan memahami pengertian, tahapan-tahapan dan perhitungan dalam negosiasi dan lobby serta dapat melakukan kerja sama dan konfrontrasi b. Pokok bahasan (1) Pengertian negoisasi dan lobby (2) Tahapan-tahapan dalam negoisasi dan lobby (3) Perhitungan dalam lobby (4) Tekhnik kerja sama dan konfrontasi	Wajib	150 Menit

d. Follow Up Sekolah Kader KOPRI (SKK)

Follow up atau tindak lanjut SKK adalah serangkai kegiatan yang diselanggarakan untuk kader perempuan PMII yang telah melaksanakan SKK. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya dan sebgaai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman kader baru PMII atas materi-materi PKD dan SIG. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan khusus bagi kader baru.

2. Penyelenggara

Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerja sama dengan KOPRI disetiap level kepengurusan dan peserta yang dibentuk dalam sesi general review dan RTL SKK

3. Kegiatan Follow Up

   Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan ketrampilan sehingga diharapkan kader perempuan PMII benar-benar memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan follow up sebagai berikut :

   a. Pelatihan Advokasi

      Diharapkan kader-kader perempuan mampu untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat.Pelatihan ini dimaksudkan agar kader-kader perempuan peka terhadap kondisi dan realita yang memarginalkan, strereotype, mensubordinasi perempuan, dan lain-lain.Terlebih kader perempuan mampu mengadvokasi/ melakukan pendampingan rakyat yang lebih luas.

   b. Kursus Politik

      Kursus politik ini diarahkan khusus untuk kader-kader perempuan PMII yang telah mengikuti SKK, dan untuk mengasah kepekaan naluri relasi sosial kader ditengah masyarakat.Dalam status sebagai kader, seorang individu harus mulai dapat melihat posisi dan fungsi dirinya baik didalam organisasi maupun dilingkungan yang lebih luas tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.

   c. Pengembangan KOPRI berbasis wilayah

      Pengembangan KOPRI berbasis wilayah ini diharapkan kader KOPRI dapat membaca peluang sesuai asas lokalisasi masing-masing cabang. Dan mengajak masyarakat terutama kaum perempuan untuk turut serta mengembangkan potensi daerah lokal.

3. Kurikulum Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN)

a. Ketentuan Umum Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN)

❖ Pengertian

Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah fase pengkaderan untuk membangun dan memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan yang akan menopang pilihan gerak kader KOPRI untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. SKKN merupakan fase ketiga dalam proses kaderisasi di KOPRI, dan SKKN untuk kader yang telah melaksanakan SKK dan PKL.

❖ Tujuan

Secara umum SKKN bertujuan untuk membentuk kader MUJTAHID yakni kategori kader pelopor, pembaharu atau kreator.

Secara khusus, setelah mengikuti SKKN kader diharapkan:

a. Mampu mengembangkan kualitas kepemimpinan pergerakan perempuan.
b. Mampu merancang strategi gerakan jangka pendek dan jangka panjang bagi misi KOPRI.
c. Mampu mengidentifikasi ruang gerak dirinya saat ini dan masa yang akan datang.
d. Berkembang sebagai subyek yang percaya pada kapasitas individualitasnya sekaligus terikat pada pertaruhan kolektif.

❖ Penyelenggara

SKKN diselenggarakan oleh Pengurus Besar KOPRI dan telah mengikuti SKK dan PKL. Penyelenggara SKKN melalui bidang pengkaderan mengkoordinasi danmengarahkan pelaksanaan SKKN secara umum.

❖ Model Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan secara umum dalam SKKN adalah pendekatan partisipatoris yang menekankan keaktifan peserta untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan gagasan sesuai materi yang diberikan. Sebagaimana dalam SKK, pendekatan partisipatoris dalam SKKN digunakan dengan tetap dalam koridor tujuan pengkaderan, tujuan dari SKKN dan tujuan per sessi.

❖ Peserta

Peserta adalah kader KOPRI yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKKN.

Syarat-syarat umum peserta SKKN adalah sebagai berikut:

a. Telah mengikuti SKK ditunjukkan dengan fotocopy sertifikat SKK
b. Telah mengikuti minimal satu pengkaderan non formal lainnya, ditunjukkan dengan fotocopy sertifikat pelatihan/kursus
c. Dinilai teruji dalam pengkaderan informal dan di nilai aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PMII, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari ketua KOPRI masing-masing struktural (Ketua KOPRI Cabang/Ketua KOPRI PKC)
d. Menyusun makalah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan panitia.
e. Selain syarat-syarat diatas bersama penyelenggara, panitia berhak menyusun syarat-syarat khusus peserta SKKN.

b). Unsur Pelaksana SKKN

Unsur pelaksana SKKN adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SKKN. Sebagian unsur pelaksana SKKN ditugaskan untuk tetap berada didalam forum. Unsur pelaksana SKKN adalah sebagai berikut:

❖ Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara SKKN untuk melaksanakan SKKN. Dan panitia terdiri dari pengurus atau anggota yang telah mengikuti SKKN dengan tanda bukti berupa sertifikat. Susunan pokok panitia terdiri dari steering Comittee (SC) Organizing Comittee (OC). Secara detail susunan kepanitian dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan SKKN. Tugas panitia adalah:

a. Mematangkan konsep dan tekhnis pelaksanaan SKKN
b. Bersama penyelenggara menetapkan narasumber, fasilitator dan moderator
c. Mempersiapkan sertifikat untuk peserta, narasumber, fasilitator dan moderator
d. Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta SKKN serta mengkoordinasikannya dengan bidang kaderisasi PB KOPRI.
e. Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas SKKN
f. Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggung jawabkannya kepada penyelenggara SKKN.

- ❖ Narasumber

Narasumber SKKN adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan SKKN dan tujuan materi yang disampaikan. Narasumber dalam SKKN mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kader PMII atau KOPRI yang minimal telah mengikuti PKL dan SKK dipandang memiliki kompetensi dan maksimal duduk dijajaran PB KOPRI/PB PMII.
b. Kader PMII atau KOPRI yang telah paripurna (alumni)dan dipandang memiliki kompetensi
c. Tokoh masyarakat, akademisi atau professional yang dipandang memiliki kompetensi
d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi.

- ❖ Pemandu Ahli

Pemandu ahli adalah kader atau orang yang ditunjuk untuk mendampingi peserta SKKN secara khusus dalam sessi studi banding keprofessian. Pemandu ahli sebaiknya telah memiliki pengalaman dan memahami seluk-beluk dunia profesi yang akan dikunjungi. Tugas-tugas pemandu ahli:

a. Mendampingi peserta
b. Menjelaskan kepada peserta seluk beluk keprofesian

- ❖ Fasilitator

Kader yang minimal telah mengikuti SKKN, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKKN. Fasilitator SKKN berjumlah maksimal 2 orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai fasilitator. Tugas fasilitator dalam SKKN adaha sebagai berikut:

a. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKKN, dlll)
b. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKKN diawal kegiatan.
c. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali penangkapan dan pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKKN diakhir kegiatan.

d. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKKN.

❖ Notulen

Notulen SKKN adalah kader yang dinilai cakap dalam menyusun prosiding. Tugas notulen adalah sebagai berikut:

a. Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sessi SKKN.
b. Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk prosiding yang bisa dibaca.
c. Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulen.

❖ Petugas Forum

Petugas forum adalah kader yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan fasilitator sejauh menyangkut pelaksanaan SKKN. Petugas forum berjumlah maksimal 3 orang dan merupakan bagian dari panitia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawal kebutuhan tekhnis forum.

c). Kurikulum SKKN

NO	Materi Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN)	Status	Waktu
1.	**Histiografi NU** a. Tujuan Peserta mampu melihat gerakan perempuan NU di tingkat nasional dan internasional, dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengetahui *positioning* NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu memposisikan gerakan KOPRI dalam peta tersebut. b. Pokok bahasan (1) Pemikiran dan gerakan perempuan di Indonesia dalam sejarah fatayat dan muslimat NU ikut dalam peperangan (2) Sejarah dan dinamika NU dilihat dari perspektif sebagai	Wajib	150 Menit

	organisasi sosial-keagamaan dan kultur politik		
2.	**KOPRI Perspektif Ideologi Politik dan Organisasi** a. Tujuan Peserta mampu memposisikan dan melihat fungsi ideologi dalam gerakan KOPRI, selain itu peserta juga diharapkan mampu merumuskan pengertian ideologi sebgaimana digunakan dan dipahami oleh PMII dan KOPRI. Peserta mampu memahami pengertian organisasi secara konseptual-teoritik dan pengertian organisasi sebagaimana dijalankan PMII b. Pokok bahasan (1) Pengertian – pengertian ideologi secara teoritik dan konseptual (2) Pengertian konsep ideologi Aswaja (3) Garis perjuangan KOPRI (4) Refleksi keorganisasian	Wajib	150 Menit
3.	**Geo Ekonomi Geo Politik dan Geo Strategi Gerakan Perempuan** a. Tujuan Peserta diharapkan mampu menganalisa benang merah gerakan perempuan dunia. Dan diharapkan peserta mampu memilki pegangan untuk membaca peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi internasional serta nasional yang menuntut pensikan organisasi KOPRI b. Pokok bahasan (1) Posisi Indonesia secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi selama Perang Dingin dan Era Neoliberal (2) Misi gerakan perempuan dalam kenyataan geopolitik dan geoekonomi kontemporer (3)Kualitas-kualitas kader KOPRI yang dibutuhkan dalam	Wajib	150 Menit

	kenyataan geopolitik dan geoekonomi		
4.	**Kedaulatan Pangan berbasis Gender** a. Tujuan Peserta memahami dinamika politik pangan nasional dan membahas peran dan fungsi perempuan dalam ketahanan pangan b. Pokok Bahasan 1. Polemik reforma agraria di indonesia 2. Membedah Kebijakan pemerintah di sektor pertanian: - Bagaimana kebijakan menjaga dan memperluas lahan produktif? - Bagaimana kebijakan mendukung operasional petani terkait lahan, benih dan pupuk? - Bagaimana kebijakan pemerintah terkait mempermudah akses petani mendapatkan keuntungan dan memberantas praktek tengkulak yang merugikan petani? 3. Membedah praktek mafia pangan (pertanian) di hulu dan membedah praktek mafia pangan (pasar) di hilir	Wajib	150 Menit
5.	**Sumber Daya Alam persfektif Ekofeminism** a. Tujuan Peserta memahami dinamika Sumber Daya Alam di Indonesia dari kacamata gerakan perempuan berbasis lingkungan. b. Pokok Bahasan 1. Bagaimana kebijakan pemerintah menjaga dan memperluas lahan produktif pertambangan yang dikelola BUMN – bukan asing? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah mengelola Sumber Daya Alam dalam negeri untuk kepentingan masyarakat tanpa merusak lingkungan? 3. Bagaimana kebijakan pemerintah mempersiapkan cadangan SDA 10-20 tahun mendatang untuk kepentingan generasi mendatang?	Wajib	150 Menit

6.	**Perempuan dan Ruang Strategis Publik** a. Tujuan Peserta memahami anatomi Negara secara menyeluruh b. Pokok Bahasan 1) Deskripsi lembaga-lembaga Negara (eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta turunan lembaga Negara dari setiap klasifikasi tersebut) 2) Tantangan dan kebutuhan input lembaga-lembaga Negara 3) Proyeksi peserta memahami peluang jabatan public di lembaga-lembaga Negara 4) Strategi gerakan perempuan penguasaan lembaga-lembaga Negara	Wajib	150 Menit
7.	**Comitte Organizing** a. Tujuan Peserta memiliki keterampilan untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses menggali, menganalisis, mengklasifikasi, mengidentifikasi serta merumuskan masalah dalam rangka tercapainya perubahan sosial atau tujuan yang diinginkan b. Pokok bahasan pengertian (1) Community Organizing (2) Community Organizing sebagai bagian dari strategi dan taktik pergerakan (3) Strategi dan tekhnik Community Organizing	Wajib	150 Menit
8.	**Manajemen Pelatihan** a.Tujuan Peserta mampu memahami kegiatan pelatihan. b.Pokok Pembahasan: 1. Pelatihan merupakan proses transformasi pengetahuan dan	Wajib	150 Menit

	indoktrinasi sehingga peserta pelatihan memiliki kesadaran kritis. 2. Siapa yang melaksanakan pelatihan. 3. Bagaimana Proses persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut.		
9.	**Teknik Fasilitasi** a.Tujuannya Peserta memahami gagasan bersama secara kritis Selanjutnya menemukan dan melakukan tindakan bersama untuk mengubahnya . b.Pokok Pembahasan 1. Pra syarat yang harud dipenuhi. 2. Media dan alat-alat yang digunakan. 3. Diskusikan terlebih dahulu, masalah apa saja yang hendak dikaji, jugindikator yang ingin a dicapai bersama. 4. metode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan taiming yang tepat.	Wajib	150 Menit

d). Follow Up SKKN

Follow up atau tindak lanjut SKKN adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk kader perempuan PMII yang telah melaksanakan SKKN. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

1. Tujuan

   Follow up bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman kader baru PMII atas materi-materi PKL dan SKKN. Selain itu follow up bertujuan untuk mengembangkan keterampilan khusus bagi kader *Mujtahid*.
2. Penyelenggara follow up dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi PMII bekerjasama dengan KOPRI disetiap level kepengurusan dan peserta yang dibentuk dalam sessi general review dan RTL SKKN

3. Kegiatan Follow up

Kegiatan follow up sebagai upaya pembekalan ketrampilan sehingga diharapkan kader perempuan PMII benar-benar memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII.Kegiatan follow up sebagai berikut :

a. Pelatihan Gender Budgeting

Pelatihan ini sangat diwajibkan kepada kader untuk memahami tentang kebijakan-kebijakan anggran yang sensitif gender.KOPRI harus mampu membaca dan menganalisa anggaran-anggaran pemerintah dan pengalokasiannya.Termasuk menginventarisir masalah-masalah pembangunan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek.

b. Legal Drafting

Peserta diharapkan mampu membuat proses perencanaan membuat Undang- undang dari terbentuknya draft hingga pembuatan naskah akademik suatu produk hukum. Misalnya materi UU No.12 tahun 2011 tentang peraturan per undang-undangan hingga materi pemahaman pembuatan naskah akademik.

KOPRI

DAFTAR PUSTAKA

Amir Piliang, Yasraf. 2006. *Dunia yang Dilipat.*Yogyakarta: Jalasutra.

Ananta Toer, Pramoedya. 1985. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra.

Badaran, Morgot. 2004. *Feminisme in Islam: Seculer and Religious Convergenees*. England: Oneworld Publication.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Sejarah Kebangkitan Nasinal*, Yogyakarta: DEPDIKBUD.

E. Wieringa, Saskia.1999. *Penghancur Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garda Budaya.

Gianoults,Tina. 2001. *SETARA II.*Monthly Review Foundation.

J. Boullata,Issa. 2001. *Dekonstruksi Tradisi Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Penerj: Imam Khoiri, Yogyakarta: LKIS.

M. Marcoes, Lies dan Johan Hendrik Mueleman. 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*.Jakarta: INIS.

Nasution,Harun. 1985.*Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. Jakarta: UI Press.

PB KOPRI editor: Asep Sabar. 2000. *KOPRI Menantang Perubahan*. Jakarta: PT. Bumi Selamat.

PB PMII, *Hasil-Hasil Kongres XIV. 2005. Mukernas dan Pokja Perempuan PB PMII 2003-2005*. Jakarta: PB. PMII.

PB PMII. 1985. Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta: PB PMII.

Pucuk Pimpinan Muslimat NU. 1996. *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama Negara dan Bangsa.* Jakarta: PP Muslimat NU.

Santoso Kristeva, Nursayyid. 2010. *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: INPHISOS.

Soekarno. 1963. *Sarinah*. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno.

Suryo Chondro,Sukanti. 1985.*Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Tim Penyusun Sejarah Fatayat NU. 1984. *Sejarah Fatayat NU.* PP. Fatayat NU.

Artikel:

Asal-Usul Ketidaksetaraan Gender. lampiran 1-3.

S. Al-Ali, Najde.*The Women Movement in Egypt.* Artikel.

Modul-modul:

Modul Kaderisasi dan Gerakan KOPRI Kota Malang.

Materi-materi Konferensi Nasional Perempuan Indonesia, 2014.

Modul Kaderisasi KOPRI Jawa Barat.

Jurnal:

Indar Parawansa, Khofifah. 2003.*Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2004.*Jurnal *Harkat.* Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.

Unduhan:

http://fatayat.or.id/sejarah-kelahiran-fatayat-nu/ di unduh pada tanggal 03 Maret 2015 pukul 22.30 WIB.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.